

LAPORAN KINERJA BRMP JAWA BARAT TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA 2025

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA
BARAT
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat Tahun 2025 dapat disusun. LAKIN ini merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam pencapaian kinerja. Penyusunan LAKIN merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat disusun berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 dimana di dalamnya menggambarkan hasil kinerja kegiatan serta akuntabilitas keuangan serta hambatan dan kendala yang ada.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan secara aktif dalam penyusunan LAKIN Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat yaitu pejabat struktural, pelaksana teknis dan pelaksana administrasi serta tim Evaluasi dan Pelaporan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian atas arahan pada penyusunan LAKIN ini.

Kami berharap LAKIN ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi kontribusi bagi kemajuan pertanian Indonesia pada umumnya.



Lembang, Januari 2026

Kepala Balai,

Dr. Rustan Massinai, S.T.P, M.Sc
NIP. 196908022002121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian yang memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan pertanian di Jawa Barat. BRMP Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Bagian Kedua puluh empat Pasal 138 menyebutkan bahwa, BRMP Jawa Barat mempunyai tugas menerapkan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian dengan fungsi: a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; b) melakukan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; c) memproduksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian; d) memberikan pendampingan program pembangunan pertanian; e) Mengidentifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; f) memberikan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan h) menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2025, BRMP Jawa Barat mempunyai indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: 1) Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan, 2) Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit), 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai) dan 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai). BRMP Jawa Barat telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dengan target sebagai berikut: 1) 1 Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan, 2) 137 Unit Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan, 3) 83,04 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai) dan 4) 91 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.

Capaian kinerja BRMP Jawa Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut: telah tercapai IKU Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan sebanyak 1 jumlah lembaga yang terdiri dari 8 koperasi (capaian IKU 100%), telah tercapai 140,95 unit Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (capaian IKU 102,88%), Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat telah tercapai sebesar 83,44 nilai (capaian IKU 100,48%) dan telah terukur Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian sebesar 94,30 Nilai (Capaian IKU 103,62%).

Kegiatan strategis di BRMP Jawa Barat didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran serta Sarana dan Prasarana. Sumber Daya Manusia yang memperkuat BRMP Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 104 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 75 orang dengan berbagai jenjang pendidikan dan 29 orang P3K paruh waktu. Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2025, BRMP Jawa Barat memperoleh sumber daya anggaran berasal dari DIPA BRMP Jawa Barat. Pagu awal APBN BRMP Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 19.910.390.000,-

(Sembilan belas milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, dilakukan beberapa kali revisi anggaran sehingga total pagu anggaran hingga Desember 2025, berdasarkan DIPA Revisi ke-19, menjadi sebesar Rp. 22.347.434.000,- (Dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2025 mencapai Rp. 21.525.860.790,- (Dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 96,32 persen dari total pagu.

Selain didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Jawa Barat juga ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi bangunan gedung, kendaraan dinas, Kebun Percobaan Pusakanagara, laboratorium diseminasi, serta berbagai peralatan penunjang lainnya seperti peralatan perkantoran, yang seluruhnya merupakan barang milik negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi.....	7
2.3. Tujuan.....	7
2.4. Sasaran.....	8
2.5. Kegiatan.....	8
2.6. Perencanaan Kinerja Tahun 2025.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Analisis Kinerja.....	10
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2025.....	10
3.1.2. Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja.....	13
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun.....	29
3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya.....	31
3.1.5. Prestasi lain di luar indikator kinerja tahun 2025.....	64
3.1.6. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	65
3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	67
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	68
3.2.1. Realisasi Anggaran.....	68
3.2.2. Pengelolaan PNBPN.....	70
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja.....	71
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul	Hal.
1.	Sumber Daya Manusia BRMP Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2025	3
2.	Sumber Daya Manusia BRMP Jawa Barat Berdasarkan Jabatan Fungsional. Per 31 Desember 2025.....	3
3.	Daftar Pegawai Petugas Belajar dan Petugas Ijin Belajar Tahun 2025.....	4
4.	Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Kegiatan BRMP Jawa Barat DIPA APBN Tahun 2025	8
5.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 BRMP Jawa Barat.....	9
6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Utama Tahun 2025.....	12
7.	Capaian target indikator kinerja Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan.....	13
8.	Capaian target indikator kinerja Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan.....	24
9.	Lokasi Lahan produksi benih FS dan SS, Tahun 2025.....	24
10.	Realisasi volume benih padi kelas FS yang disertifikasi.....	24
11.	Realisasi volume benih padi kelas SS yang disertifikasi.....	25
12.	Capaian target indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.....	26
13.	Capaian target indikator kinerja Nilai IKPA BRMP Jawa Barat.....	29
14.	Capaian Target Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BRMP Jawa Barat tahun 2021 sampai 2025.....	29
15.	Perbandingan capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Jawa Barat tahun 2024-2025.....	30
16.	Capaian kinerja lainnya BRMP Jawa Barat Tahun 2025.....	31
17.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.....	33
18.	Lokasi Lahan produksi benih FS dan SS, Tahun 2025.....	49
19.	Karakter agronomis varietas padi pada kegiatan produksi benih sumber padi kelas FS/BD pada MT II/2025 di Kabupaten Subang.....	53
20.	Karakter agronomis varietas padi pada kegiatan produksi benih sumber padi kelas SS/BP pada MT II/2025 di Kabupaten Subang.....	53
21.	Realisasi volume benih padi kelas FS yang disertifikasi.....	58
22.	Realisasi volume benih padi kelas SS yang disertifikasi.....	58
23.	Mutu benih kelas FS hasil uji laboratorium.....	59
24.	Mutu benih kelas SS hasil uji laboratorium.....	59
25.	Distribusi benih sumber padi kelas FS dan SS tahun 2025.....	61
26.	Penerimaan PNPB hasil penjualan benih padi tahun 2025.....	61
27.	Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Awal).....	68
28.	Revisi Anggaran BRMP Jawa Barat TA. 2025.....	69
29.	Realisasi DIPA BRMP Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.....	70
30.	Perkiraan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BRMP Jawa Barat Tahun 2025.....	70

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul	Hal.
1.	Struktur Organisasi BRMP Jawa Barat.....	2
2.	Kebun Percobaan Pusakanagara BRMP Jawa Barat	4
3.	Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BRMP Jawa Barat.....	5
4.	Laboratorium Pengujian BRMP Jawa Barat.....	6
5.	Hasil Rasionalisasi Pelaksanaan ZI BRMP Jawa Barat Tahun 2025.....	27
6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat TA. 2025.....	28
7.	Perbandingan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Jawa Barat tahun 2021 sampai 2025.....	30
8.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian di Kabupaten Karawang.....	33
9.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian di Kabupaten Subang.....	33
10.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 3211:2009 Manggis di Kabupaten Purwakarta.....	33
11.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik di Kabupaten Purwakarta..	33
12.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik di kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang.....	35
13.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik di kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.....	35
14.	Kegiatan A1.d. Pengembangan Platform Pemangku Kepentingan Publik-Swasta....	41
15.	Kegiatan A1.e. Meningkatkan Layanan Publik untuk Dukungan Rantai Nila.....	41
16.	Kegiatan A2.a. Dukungan Pengembangan Korporasi Petani.....	42
17.	Kegiatan A2.b. Memperkuat Keterampilan Teknis, Bisnis, Keuangan, dan Organisasi Petani dalam Kelompok dan Korporasi Petani.....	42
18.	Kegiatan A2.c Pengembangan Rencana Bisnis Korporasi Petani yang Layak.....	43
19.	Kegiatan A2.d. Penyediaan Matching Grant Korporasi Petani untuk Pembiayaan Bersama Kebutuhan Bisnis Awal Korporasi Petani.....	44
20.	Kegiatan B1.d. Mengarusutamakan Penggunaan Teknologi untuk Mengatasi Hambatan Rantai Nilai di Bidang Pertanian.....	44
21.	Kegiatan B2.a. Memperkuat Kapasitas Pelaku Rantai Nilai.....	45
22.	Kegiatan B2.b. Pelatihan untuk Personel Sektor Publik.....	45
23.	Kegiatan C1. Manajemen Program.....	45
24.	Kegiatan Environmental and Social Framework (ESF).....	46
25.	Kegiatan C2. Monitoring dan Evaluasi.....	46
26.	Kegiatan C3. Knowledge Management.....	47
27.	Koordinasi internal dengan anggota tim UPBS BRMP Jawa Barat.....	48
28.	Pengolahan lahan produksi benih padi di KP Pusakanagara, pada MT-2 2025.....	49
29.	Persemaian benih kegiatan produksi benih padi di KP Pusakanagara dan mitra, Tahun 2025.....	30
30.	Penanaman padi, MK I Tahun 2025.....	51
31.	Pemupukan.....	52
32.	Pengendalian hama tikus.....	52
33.	Roguing tanaman padi.....	54
34.	Pemeriksaan pendahuluan.....	55
35.	Pemeriksaan pertanaman fase vegetatif, berbunga dan masak.....	56
36.	Panen dan penjemuran calon benih padi.....	57
37.	Blowering dan Seed Cleaning.....	57

Nomor Gambar	Judul	Hal.
38.	Pengambilan sampel uji benih oleh BPSB.....	59
39.	Pengemasan benih dan pelabelan.....	60
40.	Penyimpanan benih di gudang simpan.....	60
41.	Pendampingan teknis lapangan Percepatan Luas Tambah Tanam di Subang.....	62
42.	Kegiatan Koordinasi Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang.....	63
43.	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang Bersama Tenaga Ahli Menteri.....	63
44.	Kegiatan Koordinasi dan Pertemuan Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang.....	63
45.	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang.....	63
46.	Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	64
47.	Perhitungan efisiensi pada aplikasi e Monev SMART Kemenkeu Tahun 2025.....	65
48.	Perhitungan efisiensi pada aplikasi e Monev SMART Kemenkeu Tahun 2025.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul	Hal.
1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal).....	72
2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi II).....	74
3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi III).....	77
4.	Manual IKU BRMP Jawa Barat Tahun 2025.....	80
5.	Label Benih Kelas FS dan SS Pada Setiap Varietas.....	84
6.	Sertifikat Benih Padi Kelas FS dan SS Pada Setiap Varietasnya.....	86
7.	SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) BRMP Jawa Barat.....	88
8.	SOP Penyusunan LAKIN BRMP Jawa Barat Tahun 2025	91

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBP2MP), Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). BRMP merupakan Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. BRMP memiliki peran penting karena BRMP merupakan lembaga yang berperan penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian melalui inovasi, perakitan teknologi, dan modernisasi.

BRMP Jawa Barat memiliki tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2025 Bagian Kedua puluh empat Pasal 138. Dalam melaksanakan tugasnya, BRMP menyelenggarakan fungsi : a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; b) pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; c) pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian; d) pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; e) pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; f) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan h) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat.

Penyusunan LAKIN BRMP Jawa Barat mengacu pada PERMENTAN No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. BRMP Jawa Barat melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

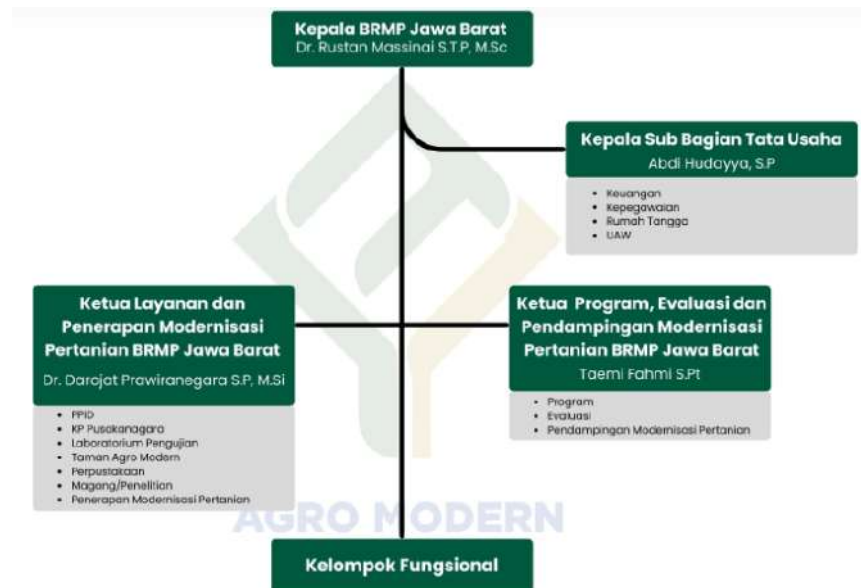
Laporan Kinerja (LAKIN) BRMP Jawa Barat ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh BRMP Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2025.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi

BRMP Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Permentan No. 10 Tahun 2025 Bagian Kedua puluh empat Pasal 138, BRMP Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian;
2. Melakukan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Memproduksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Memberikan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Mengidentifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Memberikan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
8. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat;

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BRMP Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon III a. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BRMP Jawa Barat dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Susunan organisasi BRMP Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tanggal 11 Maret 2013 tanggal 17 Januari 2023 terdiri atas: (a) Kepala; (b) Subbagian Tata Usaha; dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi BRMP Jawa Barat adalah sebagai berikut (Gambar 1):



Gambar 1. Struktur Organisasi BRMP Jawa Barat

BRMP Jawa Barat sampai dengan Desember 2025 memiliki pegawai 104 orang terdiri dari 68 orang PNS, 7 orang PPPK dan 29 orang PPPK Paruh Waktu. Pegawai BRMP Jawa Barat tersebar di 2 (dua) lokasi kerja yaitu di kantor BRMP Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Kayu Ambon 80 Lembang dan Kebun Percobaan Pusakanagara yang berlokasi di Pusakanagara Subang. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai, BRMP Jawa barat memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Secara rinci komposisi SDM BRMP Jawa Barat berdasarkan jenjang pendidikan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia BRMP Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan.
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S3	3
2	S2	17
3	S1	22
4	SM/D3/D4	8
5	SLTA	23
6	SLTP	0
7	SD	2
Jumlah		75

ASN BRMP Jawa Barat terdiri dari tiga kelompok jabatan yaitu struktural, fungsional tertentu, fungsional umum/pelaksana dan CPNS. Kelompok struktural terdiri atas Jabatan Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu yaitu Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman (PBT), Arsiparis, Pranata Humas, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pranata Keuangan APBN Mahir, Pranata Komputer, Analis SDMA Ahli Pertama, Pranata Sumber Daya Manusia Mahir, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama. Sedangkan jabatan fungsional umum/pelaksana adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (Tabel 2).

Tabel 2. Sumber Daya Manusia BRMP Jawa Barat Berdasarkan Jabatan Fungsional.
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	10
2	Penyuluh Pertanian	15
3	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	8
4	Arsiparis Penyelia	1
5	Pranata Humas Ahli Pertama	2
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
7	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
8	Pranata Komputer	1
9	Analis SDMA Ahli Pertama	1
10	Pranata Sumber Daya Manusia Mahir	1
11	Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama	1
12	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	3
13	Calon Pengawas Benih Tanaman Terampil	1
12	Fungsional Umum	28
13	Struktural	2
Jumlah		75

BRMP Jawa Barat melaksanakan pengembangan kapasitas pegawai melalui program pendidikan jangka panjang. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan mengikutsertakan ASN sebagai petugas belajar serta memberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai, sekaligus memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Data lengkap mengenai pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan memperoleh izin belajar disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Pegawai Petugas Belajar dan Petugas Ijin Belajar Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Petugas Belajar Program S3 Dalam Negeri	1
2	Petugas Belajar Program S3 Luar Negeri	1
3	Petugas Belajar Program S2 Dalam Negeri	4
4	Petugas Belajar Program S2 Luar Negeri	0
5	Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri S3 Dalam Negeri	1
6	Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri S1 Dalam Negeri	11
7	Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri S1 Luar Negeri	0
	Jumlah	18

BRMP Jawa Barat mendapatkan anggaran dari DIPA BRMP Jawa Barat dengan total pagu anggaran sampai Desember 2025 sebesar Rp. 22.347.434.000,- . Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BRMP Jawa Barat didukung sejumlah fasilitas berupa sarana dan prasarana, yang terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, sarana berupa kebun percobaan, Unit Pelayanan Benih Sumber, laboratorium dan peralatan lainnya seperti peralatan kantor, yang semuanya merupakan barang/kekayaan milik negara. Salah satu fasilitas utama tersebut adalah Kebun Percobaan Pusakanagara yang merupakan sarana milik BRMP Jawa Barat dengan luas lahan dan bangunan seluas 42,174 hektare (Ha) yang terletak di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, Jawa Barat. Fasilitas yang dimiliki adalah lahan sawah 33 Ha dan lahan non-sawah (kantor, mess, lantai jemur, gudang, kebun dan embung air) seluas 9,174 Ha. KP Pusakanagara berada pada agroekosistem lahan sawah dengan fokus pada komoditas tanaman pangan khususnya komoditas padi.



Gambar 2. Kebun Percobaan Pusakanagara BRMP Jawa Barat

Selain KP Pusakanagara, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BRMP Jawa Barat merupakan kelembagaan internal BRMP Jawa Barat yang mempunyai tugas menyediakan benih/bibit bersertifikat. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat melayani penyediaan benih tanaman pangan berkualitas, khususnya komoditas padi dan kedelai baik secara komersial maupun diseminasi. Benih yang diproduksi oleh BRMP Jawa Barat merupakan Varietas Unggul Baru (VUB) yang memiliki keunggulan spesifik, di antaranya:

- Padi sawah irigasi
- Padi lahan sawah tadah hujan
- Padi tahan tungro
- Padi umur genjah
- Kedelai provitas tinggi
- Kedelai toleran naungan
- Kedelai umur genjah



Gambar 3. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BRMP Jawa Barat

Selain sarana produksi benih, BRMP Jawa Barat juga memiliki laboratorium pengujian yang saat ini telah memiliki sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium ini menjadi bagian penting dalam mendukung mutu layanan dan produk yang dihasilkan. Ruang lingkup dari kegiatan laboratorium terstandar adalah :

- 1) Pelaksanaan pelayanan jasa analisis mutu benih padi, kedelai dan beras
Kegiatan ini merupakan kegiatan analisis rutin yang dilaksanakan oleh laboratorium pengujian BRMP Jawa Barat. Pengguna jasa datang secara langsung dengan membawa sampel yang akan diuji ke laboratorium dan di layani langsung oleh staf laboratorium
- 2) Peningkatan mutu sarana dan prasarana
Melalui kegiatan ini dapat memenuhi peralatan/bahan yang dibutuhkan laboratorium dalam mewujudkan laboratorium yang terstandar.
- 3) Peningkatan Kompetensi personil
Melalui kegiatan ini dapat memenuhi kompetensi personil untuk menjamin berlangsungnya proses kegiatan manajemen mutu di laboratorium dengan berbasis kepada SNI ISO/IEC 17025:2017.



Gambar 4. Laboratorium Pengujian BRMP Jawa Barat

II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi

Visi BRMP Jawa Barat mengikuti visi BRMP yaitu **"Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju."**

2.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang diemban adalah:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, kelanjutan usahatani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

2.3. Tujuan

Sesuai mandat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian kepada BRMP Jawa Barat untuk melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan, dengan indikator jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan;
- 2) Memproduksi benih/bibit sumber spesifik lokasi;
- 3) Mewujudkan reformasi birokrasi BRMP Jawa Barat yang efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan primas dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 4) Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran.

2.4. Sasaran

Sasaran kinerja BRMP Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan.
2. Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif.
3. Terwujudnya birokrasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat yang efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan prima.
4. Terkelolanya anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat yang akuntabel dan berkualitas.

2.5. Kegiatan

Pada tahun 2025 BRMP Jawa Barat melaksanakan 3 (tiga) program kegiatan yaitu: 1) Standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang pertanian; 2) Perakitan dan modernisasi pertanian; dan 3) Dukungan manajemen fasilitasi dan modernisasi pertanian. Daftar kegiatan dan alokasi anggaran BRMP Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Kegiatan BRMP Jawa Barat DIPA APBN Tahun 2025

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Pagu Anggaran (Rp,-)
1	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Bambang Sunandar, SP, MP	107.163.000
2	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (<i>ICARE</i>)	Yayan Rismayanti, S.Pt, MP	9.326.884.000
3	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (137 Unit)	Irma Noviana, SP, M.Si	2.436.435.000
4	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Bambang Sunandar, SP, MP	1.190.000.000
5	Layanan BMN	Abdi Hudayya, SP	10.000.000
6	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dr. Darajat Prawiranegara, SP, M.Si	20.000.000
7	Layanan Umum	Abdi Hudayya, SP	130.000.000
8	Layanan Perkantoran	Abdi Hudayya, SP	9.176.952.000
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Bambang Sunandar, SP, MP	40.000.000

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen antara pimpinan dan unit kerja yang memuat penugasan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai dasar pengukuran kinerja, evaluasi capaian program dan kegiatan, serta wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi serta mendukung peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, BRMP Jawa Barat telah menetapkan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat dengan Kepala Badan Modernisasi Pertanian. Melalui PK ini, BRMP Jawa Barat menegaskan komitmen arah kerja, indikator keberhasilan, serta target terukur yang menjadi dasar pelaksanaan program modernisasi pertanian di wilayah Jawa Barat selama tahun 2025. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah dilakukan 3 (tiga) kali perubahan PK. PK Awal BRMP Jawa Barat tahun 2025 masih menggunakan nomenklatur Balai Penerapan Standarisasi Pertanian (BSIP) Jawa Barat ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2025. Revisi PK kedua dilakukan pada tanggal 20 Mei 2025 seiring dengan perubahan nomenklatur dari Balai Penerapan Standar Pertanian Jawa Barat menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian sasaran kinerja dan penambahan anggaran untuk kegiatan Produksi Benih Padi sebesar Rp. 2.346.435.000,- sehingga PAGU Anggaran bertambah dari Rp. 19.910.390.000,- menjadi Rp. 23.406.825.000,-. Revisi PK ketiga dilakukan pada 31 Desember 2025 dengan adanya penyesuaian renstra BRMP 2025-2029. Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat Tahun 2025 revisi terakhir disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 BRMP Jawa Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usahatani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	137	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern (Jumlah)	-	Orang
LAINNYA				
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	83,04	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	91	Nilai
Total				
Rata-rata				

Sumber data: PK BRMP Jawa Barat, 2025

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, maka realisasi sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa ketiga sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.

3.1. Analisis Kinerja

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2025

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; (3) harus relevan; (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak; (5) harus fleksibel dan sensitif; dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan; dan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja BRMP Jawa Barat didorong oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran juga didorong oleh dukungan manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana kegiatan. Dalam upaya pencapaian target perjanjian kinerja (PK) BRMP Jawa Barat, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik melalui mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BRMP Jawa Barat dengan menyusun laporan fisik bulanan dan laporan lain yang disampaikan ke BBRMP secara periodik.

Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Indikator kinerja yang dilakukan di BRMP Jawa Barat adalah berdasarkan indikator realisasi output. Dalam mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2025 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) **sangat berhasil** (capaian > 100%); (2) **berhasil** (capaian 80-100%); (3) **cukup berhasil** (capaian 60-<80%); dan (4) **kurang berhasil** (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BRMP Jawa Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2025 dengan realisasinya melalui pengumpulan laporan yang dilakukan di akhir tahun. Realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran sampai akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2024 telah dapat dicapai dengan hasil baik. Hasil ini diperkuat oleh adanya dokumen pendukung yang disampaikan setiap kegiatan ke BRMP Jawa Barat terkait perkembangan capaian indikator kinerja utama (IKU) disertai hasil monitoring dan evaluasi tim Monev BRMP Jawa Barat di beberapa kegiatan secara selektif untuk memastikan seberapa jauh tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan untuk memantau capaian output adalah melalui pelaporan berkala capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulanan beserta kendala yang dihadapi. Sehingga dengan demikian diharapkan bila tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Realisasi sampai akhir tahun 2025 menunjukan bahwa sasaran kinerja BRMP Jawa Barat telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 101,74% (**Sangat Berhasil**). Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut terangkum sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa kinerja BRMP Jawa Barat tahun 2025 secara umum telah mencapai sasaran kinerja yang ditargetkan. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (pengawas mutu hasil pertanian, penyuluh, pengawas benih tanaman, pustakawan, arsiparis, pranata humas, pranata keuangan APBN, pranata komputer, analis kepegawaian dan tenaga administrasi), serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Utama Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)	Capaian Sesuai LAKIN (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usahatani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	8	800	100
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	-	-	-
		2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	137	140,95	102,88	102,88
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern (Jumlah)	-	-	-	-
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	83,04	83,44	100,48	100,48
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	91	94,30	103,62	103,62
Total						406,98
Rata-rata						101,74

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 BRMP Jawa Barat disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usahatani
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan pertama, diukur dengan indikator kinerja yaitu Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan. Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2025 terealisasi 8 Jumlah lembaga penerap yang mendapatkan pendampingan sehingga capaian indikator ini sebesar 800% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Namun berdasarkan Permentan 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian persentase capaian kinerja ini dinormalisasi menjadi 100%. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian target indikator kinerja Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja				
	Uraian	Target	Capaian	Kinerja (%)	Capaian sesuai LAKIN (%)
Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usahatani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1 jumlah lembaga	8 jumlah lembaga	800	100

Indikator kinerja sasaran ini secara keseluruhan telah terealisasi melebihi target, yaitu 8 jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan. Indikator kinerja ini dicapai melalui kegiatan *Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (ICARE)* dan Kegiatan Kemitraan Optmisi Pemupukan Pupuk Organik Cair (POC) Aminosan Gold Nutrisi (AGN) Pada Tanaman Padi Sawah Mendukung Program Brigade Pangan Cendekia di Kabupaten Indramayu. Lembaga yang mendapat pendampingan pada kegiatan *ICARE* adalah 5 Koperasi Kentang di Kabupaten Garut yaitu Koperasi Horti Agro Makmur, Koperasi Cikajang Agro Prakarsa, Koperasi Putra Cisurupan Berdaya, Koperasi Sukaresmi Mulus Rahayu dan Koperasi Produsen Eptilu Membangun Indonesia dan 2 Koperasi Peternak Domba di Kabupaten Garut yaitu Koperasi Peternak Cikal Maju dan Koperasi Rasana Rasyidah Mandiri.

1. Koperasi Produsen Horti Agro Makmur, Kecamatan Pasirwangi

Koperasi Produsen Horti Agro Makmur (HAM) adalah koperasi yang berdiri sejak tahun 2024 dengan produk unggulan berupa produk kentang segar, bibit berkualitas dan pengolahan pasca panen keripik kentang. Koperasi HAM beralamat di Kampung Cintasari, RT. 01, RW. 02, Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Koperasi Produsen Horti Agro Makmur telah memiliki Badan Hukum NOMOR AHU-0000798.AH.01.29.TAHUN 2024.

Koperasi Horti Agro Makmur memiliki tujuan dan sasaran strategis untuk membantu koperasi dalam mencapai visi dan misi. Tujuan Koperasi Agro Horti Makmur adalah: (1) meningkatkan produksi kentang para petani; (2) meningkatkan produktivitas dan kontinuitas serta daya saing produk kentang; dan (3) meningkatkan SDM petani dan mengadopsi teknologi inovasi pertanian. Adapun sasaran strategis dari koperasi ini adalah: (1) terjaganya ketersediaan produksi kentang; (2) meningkatkan kesejahteraan para petani kentang; (3) meningkatnya kualitas hasil panen dan daya saing; (4) pertanian yang ramah lingkungan; dan (5) membuka lapangan pekerjaan.

Koperasi HAM memiliki anggota sebanyak 122 petani dari 5 desa yang ada di wilayah Kecamatan Pasirwangi yaitu dari Desa Karya Mekar, Sarimukti, Padaawas, Barusari, dan Desa Pasirwangi. Komposisi anggota terdiri dari 50% petani milenial, 5% petani wanita dan 45% merupakan petani senior yang memiliki pengalaman dalam usaha budidaya kentang. Proyeksi penambahan anggota koperasi merupakan salah satu tujuan pengembangan kelembagaan koperasi HAM kedepan dengan target jumlah anggota minimal 250 orang dalam 5 tahun kedepan.

Kemampuan koperasi dalam memenuhi kapasitas produksi kentang dari koperasi sebesar ± 25 ton/hektar. Proses produksi Kentang dilakukan secara konvensional dengan tahapan pemilihan benih yang berkualitas, persiapan pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar dan pemeliharaan tanaman agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit sehingga tanaman sehat sampai umur siap panen pada 100 - 120 HST. Hasil panen petani diterima oleh koperasi untuk kemudian dijual kepada customer di pasar tradisional, pasar induk, dan pasar modern, dengan tujuan jangka panjang bisa mengeksport hasil panen anggota koperasi keluar negeri.

2. Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa, Kecamatan Cikajang

Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa adalah koperasi yang berdiri sejak tahun 2024 dengan produk unggulan adalah Kentang Segar berkualitas yang beralamat di Jl. Cikuda, No. 450, Desa Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa telah memiliki badan hukum berupa keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000802.AH.01.29. Tahun 2024. Pendirian Koperasi didasarkan atas kesulitan untuk memasarkan produk mereka secara efisien dan mencapai pasar yang lebih luas. Koperasi dapat membantu dalam memfasilitasi akses ke pasar lokal, nasional, atau bahkan internasional melalui strategi pemasaran yang terkoordinasi. Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar kentang, sehingga diharapkan koperasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Visi Koperasi Cikajang Agro Prakarsa adalah: mewujudkan perekonomian pertanian Kabupaten Garut yang terintegrasi akuntabel dan inklusif menuju pertanian yang berkelanjutan. Misi nya adalah: (1) memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia anggota koperasi melalui penguatan atau peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi; (2) mendukung produksi pertanian melalui peningkatan mutu hasil dengan standarisasi dan daya dukung pertanian (agroinput); (3) meningkatkan kesejahteraan dengan tatakelola dan akuntabilitas serta transparansi; (4) meningkatkan nilai tambah produksi hasil pertanian dengan inovasi dan teknologi serta Kerjasama kemitraan; dan (5) meningkatkan dan memperkuat generasi petani.

Koperasi Cikajang Agro Prakarsa memiliki tujuan dan sasaran strategis untuk membantu koperasi dalam mencapai visi dan misi. Tujuan dan sasaran strategis Koperasi Cikajang Agro Prakarsa adalah meningkatkan perekonomian petani Kabupaten Garut,

melalui: (1) meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta kompetensi petani; (2) agroinput; (3) memastikan bahwa kentang yang dihasilkan memenuhi standar; dan (4) meningkatkan jumlah produksi kentang. Saat ini Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa telah memiliki 162 orang anggota dengan luas lahan pertanian 72,56 hektar.

3. Koperasi Produsen Putra Cisarupan Berdaya, Kecamatan Cisarupan

Koperasi Putra Cisarupan Berdaya adalah koperasi yang berdiri sejak tahun 2024 tepatnya pada tanggal 1 Maret 2024, dengan nomor Badan Hukum AHU-0000797.AH.01.29. TAHUN 2024, dengan produk unggulan kentang segar berkualitas. Koperasi ini beralamat di Jl. Cagak, RT. 04, RW. 10, Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Pendirian koperasi didasarkan atas kesamaan visi dan misi antara petani kentang, pengusaha, dan kemitraan yang ingin memajukan kesejahteraan petani di sekitar Cisarupan. Koperasi didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar kentang, sehingga diharapkan koperasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Visi Koperasi Putra Cisarupan Berdaya adalah menjadi Koperasi produsen Kentang terdepan dan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Dengan Misinya adalah: (1) meningkatkan produksi dan kualitas kentang; (2) meningkatkan kesejahteraan petani kentang; dan (3) membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan semua pihak. Tujuan dan sasaran strategis Koperasi Putra Cisarupan Berdaya adalah selalu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani kentang di Kabupaten Garut melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Saat ini Koperasi Produsen Putra Cisarupan Berdaya telah memiliki 161 orang anggota dengan luas lahan pertanian 80 hektar. Koperasi Putra Cisarupan Berdaya tercatat memiliki 161 orang anggota, yang didominasi oleh anggota laki-laki sebanyak 149 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Dari sisi struktur usia, koperasi ini memiliki 54 orang petani muda (≤ 40 tahun) dan 85 orang petani dewasa (> 40 tahun), dengan rata-rata usia anggota 44 tahun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi ditopang oleh petani berpengalaman, sekaligus masih memiliki ruang untuk penguatan regenerasi petani.

4. Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu, Kecamatan Sukaresmi

Koperasi Petani Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu ("KP-SMR") adalah koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota, masyarakat sekitar dan perorangan maupun lembaga sekitar melalui fasilitas pengelolaan budidaya dan pengembangan usaha lainnya dalam berbagai bidang. Jasa pelayanan kami meliputi pembibitan kentang, budidaya kentang, jasa alsintan, pupuk dan pemberantasan hama. Semua ini kami siapkan untuk memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani.

Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu memiliki badan hukum AHU-0000800.AH.01.29.TAHUN 2024 yang beralamat di Kp. Cimencek, RT. 05, RW. 06, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu menawarkan layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan non anggota yang menjadi petani. Penangkar kentang yang ada di koperasi kami berpengalaman, terlatih dan bersertifikat serta dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan mutakhir. Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu akan bekerja dengan petani dari awal pembibitan hingga panen tiba. Koperasi juga menawarkan berbagai usaha yang bisa menunjang kesejahteraan lainnya seperti pengolahan hasil panen, alat-alat pertanian primer dan sekunder, dan masih banyak yang lainnya.

Koperasi ini telah menjalin kemitraan dengan berbagai pembeli (*buyer*) dari pasar, UMKM, penyedia sarana produksi. Mitra pasar kami antara lain Pasar Induk Bekasi Timur dengan kapasitas serapan ± 30 ton/bulan untuk pendukung distribusi ke wilayah Jabodetabek dan sektor industri pengolahan, Pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut dengan kapasitas serapan $\pm 7-8$ ton/bulan untuk distribusi langsung ke pedagang pengecer dan rumah tangga, pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kecamatan Pasirwangi, Kab. Garut dengan kapasitas 2 ton/hari, serta bermitra dengan penyedia sarana produksi (obat dan pestisida) yang dikelola oleh koperasi. Saat ini Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu telah memiliki 176 orang anggota dengan luas lahan pertanian 175 hektar.

5. Koperasi Produsen Eptilu Membangun Indonesia, Kecamatan Cigedug

Koperasi Eptilu Membangun Indonesia adalah koperasi yang berdiri tanggal 6 Januari 2021, dengan nomor Badan Hukum AHU-0007762.AH.01.26 Tahun 2021. Bergerak dibidang produksi produk-produk unggulan pertanian baik komoditas hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan dengan bermitra bersama para petani di seluruh Indonesia. Selain itu Koperasi Eptilu juga melakukan distribusi perdagangan dengan konsentrasi pasar lokal, pasar induk, pasar regional, antar pasar pulau, serta mendukung beberapa hotel, restoran, *catering* dan perusahaan *start up* pertanian. Pendirian koperasi didasarkan atas kesamaan visi dan misi para pendiri serta kebutuhan akan pengembangan bisnis yang terus bertumbuh. Koperasi Eptilu Membangun Indonesia didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar pertanian yang sangat besar peluangnya terutama komoditas kentang, sehingga diharapkan koperasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Anggota koperasi saat ini 125 orang, terdiri dari 89 orang laki-laki dan 36 orang perempuan, dengan total luasan kepemilikan anggota 75 hektar.

Jenis usahatani yang dilakukan oleh Koperasi Kentang ini adalah usahatani Budidaya Kentang dengan Penerapan teknologi Good Agricultural Practices (GAP)/Cara Budidaya yang baik dan Good Handling Practices (GHP)/Cara Penanganan yang Baik. Pendampingan yang diberikan kepada kelima koperasi ini berupa bimbingan teknis mencakup aspek teknis budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, panen dan pascapanen, serta manajemen usahatani dan kelembagaan koperasi. Pada aspek budidaya, pendampingan diarahkan pada penerapan teknik budidaya kentang yang baik, mulai dari penggunaan benih bermutu, pengolahan lahan, pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, hingga pengelolaan air dan drainase. Selain itu, pendampingan pengendalian hama dan penyakit dilakukan melalui penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), termasuk identifikasi hama dan penyakit utama kentang, penggunaan pestisida secara tepat dan aman, serta penerapan sanitasi dan rotasi tanaman.

Pada tahap panen dan pascapanen, pendampingan difokuskan pada penentuan waktu panen yang tepat, teknik panen untuk meminimalkan kerusakan umbi, serta kegiatan sortasi dan penanganan awal hasil panen guna menjaga mutu dan nilai jual produk. Pendampingan juga mencakup aspek manajemen usahatani dan penguatan kelembagaan koperasi, antara lain melalui pencatatan biaya produksi, analisis usaha tani, perencanaan musim tanam, serta pengelolaan hasil secara kolektif oleh koperasi. Melalui rangkaian pendampingan tersebut, Program ICARE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usahatani kentang, kualitas dan kuantitas produksi, serta memperkuat peran koperasi dalam mendukung keberlanjutan usaha anggota.

Koperasi Ternak yang mendapatkan pendampingan dari kegiatan *ICARE* adalah Koperasi Peternak Cikal Maju dan Koperasi Produsen Multi Pihak Rasana Rasyidah Mandiri. Berikut ini profil kedua koperasi ternak yaitu:

1. Koperasi Produsen Peternak Cikal Maju

Koperasi Peternak Cikal Maju adalah koperasi yang berdiri sejak tahun 2024 tepatnya pada 1 Maret 2024 dengan nomor Badan Hukum AHU-0000801.AH.01.29.TAHUN 2024 dengan produk unggulan ternak domba dan turunannya. Koperasi Peternak Cikal Maju beralamat di Kp. Babakan Pasirwangi Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Pendirian koperasi didasarkan atas kebutuhan permintaan ternak yang setiap tahun terus meningkat baik di tingkat reguler dan nasional. Selain itu, koperasi memiliki cita-cita menembus pasar internasional, sehingga didirikanlah koperasi untuk menjawab kebutuhan pasar kebutuhan ternak domba, sehingga diharapkan koperasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Proses produksi domba yang dilakukan pada Koperasi Peternak Cikal Maju menggunakan metode pemberdayaan, artinya ternak dipelihara oleh para anggota peternak di kandang yang dimiliki oleh peternak baik ternak indukan maupun bakalan/pedaging. Selanjutnya untuk proses penjualan dilakukan oleh koperasi yang ditampung di kandang koloni yang dimiliki oleh koperasi. Penampungan dimaksudkan untuk mempermudah dilakukan *quality control* (QC) terhadap ternak sebelum dilakukan proses penjualan. Sumber daya manusia koperasi sangat mendukung proses pengembangan bisnis koperasi, dimana saat ini SDM koperasi terdiri dari satu orang manager bisnis yang dibantu tiga orang staf supervisor produksi, pemasaran, dan administrasi, serta dua orang anak kandang untuk teknis di lapangan. Saat ini Koperasi Produsen Peternak Cikal Maju telah memiliki 121 orang anggota dengan luas lahan kandang sekitar 3 hektar yang terdistribusi di anggota, dengan kapasitas produksi 1.600 ekor domba per tahun.

2. Koperasi Produsen Multi Pihak Rasana Rasyidah Mandiri

Koperasi Rasana Rasyidah Mandiri adalah koperasi yang berdiri sejak tanggal 27 Oktober 2017 yang pada awalnya didirikan untuk membantu peningkatan kesejahteraan Guru dan Masyarakat di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Rasana Rasyidah yang awal mulanya memiliki produk unggulan yaitu produk hasil pertanian. Seiring berkembangnya dari waktu ke waktu dari yang awal mulanya hanya berfokus pada budidaya dan produk hasil pertanian kini koperasi memiliki fokus baru yaitu bergerak pada sektor peternakan domba didasari karena sebagian besar anggota yang memiliki *background* peternakan. Koperasi Rasana Rasyidah Mandiri beralamat di Kp. Buleud RT 04, RW 04, Desa Cintadamai, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Koperasi Rasana Rasyidah Mandiri telah memiliki badan hukum dengan Nomor AHU-0002106.AH.01.27 Tahun 2021. Jumlah anggota sampai saat ini adalah 48 orang.

Koperasi Rasana Rasyidah Mandiri memiliki peran yang signifikan dalam memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui kegiatan peternakan domba Garut dan pengolahan produk sampingan, koperasi ini memberdayakan masyarakat lokal, terutama petani dan peternak, dengan memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam usaha produktif yang meningkatkan pendapatan mereka dengan program *Fattening* Domba Garut. Koperasi juga memberikan pelatihan kepada anggotanya, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial yang penting dalam mengelola ternak, menggunakan teknologi modern, dan mengolah produk hasil

peternakan. Dengan begitu, koperasi ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan ekonomi yang semakin kompetitif.

Dampak ekonomi yang dihasilkan oleh koperasi juga sangat signifikan. Program breeding dan fattening domba Garut memberikan anggota koperasi akses ke sumber pendapatan yang stabil melalui penjualan daging dan pengolahan produk sampingan, seperti pupuk organik dan bulu domba. Selain itu, koperasi ini mendorong berkembangnya usaha mikro dan UKM lokal, yang menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat sekitar. Dengan adanya koperasi, banyak keluarga yang mengalami peningkatan kesejahteraan, dan perekonomian desa pun berkembang lebih dinamis.

Selain dampak sosial dan ekonomi, koperasi Rasana Rasyidah Mandiri juga berkomitmen dalam melibatkan perempuan dan anak muda dalam berbagai kegiatan usaha. Perempuan diberdayakan dalam pengolahan produk daging dan pengelolaan pupuk organik, memberikan mereka akses ke sumber pendapatan tambahan dan memperkuat peran mereka dalam perekonomian keluarga. Sementara itu, anak muda dilibatkan dalam penggunaan teknologi, seperti aplikasi manajemen ternak dan sistem pemetaan digital, yang tidak hanya memberikan mereka keterampilan baru, tetapi juga menjadikan mereka bagian penting dari keberlanjutan bisnis koperasi. Dengan demikian, koperasi ini menjadi motor penggerak dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di masyarakat.

Jenis usahatani yang dilakukan oleh Koperasi Peternak Domba ini adalah usaha penggemukan dan pembibitan domba dengan penerapan teknologi *Good Farming Practices* (GFP). Pendampingan yang diberikan kepada kedua koperasi ini berupa bimbingan teknis mencakup pengelolaan kandang yang higienis, pemberian pakan sesuai kebutuhan nutrisi, penerapan kesehatan hewan dan kesejahteraan ternak, serta pencatatan usaha ternak secara tertib guna mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Lembaga yang mendapatkan pendampingan dari kegiatan Kegiatan Kemitraan Optimasi Pemupukan Pupuk Organik Cair (POC) *Aminosan Gold Nutrisi* (AGN) Pada Tanaman Padi Sawah Mendukung Program Brigade Pangan Cendekia di Kabupaten Indramayu adalah Kelompok tani Brigade Pangan Cendekia yang bergerak di bidang usahatani padi. Kelompok tani ini berada di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu. Brigade Pangan Cendekia dibentuk dengan nama asli Brigade Pangan "Sri Unggul" berdasarkan Keputusan Kuwu Desa Wanasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu No. 08 tahun 2025.

Pembentukan BP "Sri Unggul" dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025. Anggota BP "Sri Unggul" sebanyak 20 orang pemuda dengan kisaran usia 24-39 tahun. Secara struktur organisasi, BP "Sri Unggul" sedikit berbeda dengan BP pada umumnya, dimana pada BP "Sri Unggul" terdapat bendahara, sedangkan pada BP pada umumnya tidak ada bendahara. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa BP "Sri Unggul" adalah unit usaha/mitra koperasi dan siap mengelola pertanian hulu hilir, tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis dan operator kegiatan.

Aktivitas BP "Sri Unggul" bidang usahanya tidak hanya terbatas pada proses produksi padi di sawah, tetapi berkembang menjadi bagian dari sistem usaha tani terpadu yang mencakup pembiayaan sarana produksi, pengaturan alsintan, pengaturan air irigasi, pengelolaan hasil, serta pemasaran gabah dan beras. Salah satu bentuk peran strategis yang dijalankan adalah pembelian gabah hasil panen petani dengan harga yang wajar, sehingga memberikan kepastian pasar sekaligus melindungi petani dari fluktuasi harga di tingkat tengkulak. Dalam skema ini, petani tidak dibebani modal awal usahatani karena

seluruh kebutuhan sarana produksi, seperti pupuk dan pemakaian alat mesin pertanian, ditalangi terlebih dahulu oleh koperasi melalui BP. Mekanisme pembayaran dilakukan pada saat panen dalam bentuk gabah, sehingga petani dapat menjalankan usaha tani secara lebih tenang dan berkelanjutan tanpa tekanan pembiayaan di awal musim tanam. Dengan mekanisme ini, bagi petani anggota koperasi mempunyai tambahan keuntungan yaitu adanya potongan harga biaya alsintan untuk traktor dan *combine harvester* masing-masing sekitar Rp 200.000,- – Rp 300.000,-.

Luas lahan yang dikelola BP "Sri Unggul" adalah 200 ha, dimana status pengelolaan langsung lahan tersebut oleh petani pemilik/penyewa bukan dikelola secara langsung oleh BP seperti aturan pada umumnya. Dari 200 ha lahan tersebut, 50 ha lahan dijadikan percontohan penggunaan POC AGN bekerjasama dengan BRMP Jawa Barat.

Penguatan peran BP "Sri Unggul" semakin berkembang setelah terjalannya kerja sama dengan Kelompok Kerja Pangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sinergi ini tidak hanya memperkuat aspek pendampingan teknis, tetapi juga meningkatkan kapasitas kelembagaan, jejaring kemitraan, serta akses pasar hasil pertanian. Sejak terbangunnya kerja sama tersebut, BP "Sri Unggul" kemudian lebih dikenal dengan sebutan BP "Cendekia", yang merepresentasikan identitas kelembagaan berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pendampingan ICMI, BP "Cendekia" juga memperoleh akses pasar beras ke wilayah Jakarta melalui jaringan koperasi mitra, sehingga membuka peluang hilirisasi produk dalam skala yang lebih luas dan bernilai tambah lebih tinggi bagi petani.

Selain penguatan pasar dan sistem usaha, kerja sama antara BP "Cendekia", ICMI, dan BRMP juga melahirkan skema sosial ekonomi berbasis wakaf dan zakat dari hasil panen petani. Petani yang mengalami peningkatan hasil sebagai dampak dari introduksi teknologi budidaya dikenakan wakaf sebagai bentuk kontribusi sosial. Bagi petani yang tingkat kenaikan hasilnya telah mencapai nisob, diberlakukan pula kewajiban zakat. Wakaf dan zakat tersebut tidak disetorkan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk gabah yang diserahkan pada saat panen. Skema ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan dalam sistem usaha tani, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan modal sosial untuk mendukung keberlanjutan program pendampingan dan pengembangan kelembagaan.

Hubungan kerja sama antara BP "Cendekia" dan petani juga diatur melalui pola bagi hasil yang bersumber dari kenaikan produksi akibat penerapan teknologi. Dari tambahan hasil panen yang diperoleh, setelah dikurangi kewajiban pembayaran sarana produksi, biaya alsintan, serta kewajiban wakaf dan zakat, dilakukan pembagian hasil dengan komposisi 90% untuk petani dan 10% untuk BP. Pola bagi hasil ini mencerminkan keberpihakan yang kuat kepada petani sebagai pelaku utama usaha tani, sementara bagian untuk BP menjadi sumber penguatan kelembagaan, operasional pendampingan, dan pengembangan unit usaha. Dengan demikian, BP "Cendekia" tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis budidaya, tetapi telah berkembang sebagai lembaga yang mengintegrasikan aspek produksi, pembiayaan, pemasaran, serta nilai sosial dalam satu sistem usaha pertanian yang berkelanjutan. Pendampingan Tahun 2025 Program Brigade Pangan Cendekia adalah:

1. Pengenalan Budidaya padi ramah lingkungan dengan penambahan POC dan pengurangan dosis pupuk anorganik

Kegiatan pendampingan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang pentingnya pertanian ramah lingkungan melalui pemupukan berimbang. Petani

mulai menyadari perlunya keseimbangan antara pupuk anorganik dan organik untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan produksi, yang tercermin dari perubahan sikap, ketepatan dalam dosis pemupukan, serta meningkatnya kemauan untuk mengadopsi praktik budidaya ramah lingkungan secara mandiri.

2. Pemanfaatan limbah padi (hilirisasi): pembuatan pupuk organik dan pembenah tanah (arang sekam)

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan, pemulihan kesehatan tanah sawah menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini. Hal ini selaras dengan semangat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pertanian Organik untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang menekankan pentingnya penggunaan input ramah lingkungan. Lahan sawah yang sehat akan mampu meningkatkan produktivitas secara alami, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis, serta menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.

Untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya anggota Brigade Pangan Cendekia, melalui pelatihan yang terarah. Brigade ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendiseminasikan praktik pertanian organik kepada petani, koperasi, maupun komunitas tani. Oleh karena itu, pelatihan yang difokuskan pada pengenalan pupuk organik, teknik pembuatan, serta pemanfaatannya menjadi langkah strategis agar keterampilan teknis mereka meningkat dan dapat diterapkan secara luas.

Pelatihan pembuatan pupuk organik mencakup pemahaman bahan baku lokal yang melimpah, seperti kotoran ternak, limbah pertanian, dan sampah organik rumah tangga. Bahan-bahan tersebut, jika diolah dengan baik, mampu menjadi sumber hara utama yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, pupuk organik juga berfungsi memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, serta menjaga ketersediaan unsur hara secara berkelanjutan. Dengan keterampilan ini, Brigade Pangan Cendekia akan memiliki bekal teknis yang kuat dalam mengembangkan pertanian organik.

Selain pupuk organik, penting pula dikenalkan teknologi pembenah tanah berbasis *biochar* yang berasal dari sekam padi. Biochar memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, menstabilkan unsur hara, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Pelatihan pembuatan biochar akan memberi nilai tambah dalam pengelolaan limbah pertanian sekaligus memperbaiki kualitas tanah. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya mendukung peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon dalam tanah.

3. Pelatihan teknis produksi benih padi dan administrasi perbenihan

Brigade Pangan Cendekia merupakan salah satu komunitas petani muda yang terus menunjukkan potensi besar dalam penguatan sektor pertanian di tingkat wilayah. Selain berfokus pada budidaya padi dan hilirisasinya, Brigade Pangan Cendekia juga memiliki peluang untuk berperan sebagai penyedia benih bermutu bagi petani di sekitarnya. Kebutuhan benih unggul di wilayah Brigade Pangan Cendekia cukup tinggi, sehingga kehadiran penangkar lokal akan sangat membantu efisiensi penyediaan benih sekaligus meningkatkan kemandirian petani. Salah satu kelompok yang menunjukkan minat kuat dalam bidang perbenihan adalah Brigade Pangan Cendekia Sri Unggul yang berlokasi di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggotanya, Brigade Pangan Cendekia Sri Unggul diberikan pelatihan teknis produksi benih padi yang diselenggarakan oleh Tim BRMP

Jawa Barat. Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal pembentukan penangkar benih padi muda yang profesional, tersertifikasi, dan mampu memenuhi standar mutu benih nasional.

Administrasi perbenihan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produksi benih berjalan sesuai aturan, terjadwal dengan baik, dan memenuhi seluruh persyaratan legal. Administrasi yang baik akan menjadi fondasi bagi penangkar dalam mengembangkan usaha benih yang berkelanjutan dan mampu bersaing secara formal di pasar benih nasional.

4. Pembuatan kompos berbahan baku kotoran hewan dan sekam

Upaya memperbaiki kesuburan tanah secara berkelanjutan semakin mendapat perhatian dalam praktik pertanian modern. Pertanian ramah lingkungan menekankan pentingnya penggunaan bahan organik untuk menjaga kesehatan tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, serta memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Salah satu cara yang paling mudah dan ekonomis untuk menyediakan bahan organik adalah dengan melakukan pembuatan kompos secara mandiri, menggunakan bahan-bahan limbah yang tersedia di sekitar lahan. Oleh karena itu, Brigade Pangan Cendekia Sri Unggul terus mendorong anggota untuk mempraktikkan pembuatan kompos yang efektif dan efisien.

5. Penguatan kelembagaan Brigade Pangan Cendekia

Penguatan kelembagaan merupakan aspek penting dalam membangun sebuah organisasi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam suatu lembaga, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang menjadi fondasi utama agar setiap program dan kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan pembagian tugas yang jelas, masing-masing individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya, sehingga dapat bekerja secara terarah tanpa terjadi tumpang tindih fungsi maupun kekosongan peran. Sementara itu, pendelegasian wewenang memungkinkan anggota untuk mengambil keputusan sesuai bidang tugasnya, sehingga kapasitas personal dan kepemimpinan individu dapat terus berkembang. Dua prinsip ini bukan hanya memperkuat kinerja lembaga, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang tertib, transparan, serta mampu bertahan dalam jangka panjang.

Perbedaan yang paling fundamental dengan BP pada umumnya terletak pada status pengelolaan lahan. Brigade Pangan mengelola lahan secara langsung, di mana lahan berada dalam pengelolaan penuh brigade. Model ini mencerminkan pendekatan korporasi tani, di mana tenaga brigade bertindak sebagai operator utama pengelolaan budidaya. Adapun BP Cendekia menggunakan model berbeda, di mana lahan tetap dikelola oleh petani, sementara brigade berperan sebagai pendamping, manajerial, penyedia layanan, dan penggerak inovasi. Model ini bersifat *collaborative farming*, bukan *centralized farming*, sehingga memberi ruang peran lebih besar bagi petani dalam pengelolaan lahan. Model ini lebih adaptif diterapkan pada wilayah dengan kepemilikan lahan kecil dan heterogen karena tidak menuntut pengambilalihan kontrol budidaya oleh lembaga, melainkan memperkuat kapasitas petani melalui transfer pengetahuan dan pendampingan teknis.

Dari sisi dampak ekonomi, pola pembagian hasil pada kedua lembaga juga mencerminkan pendekatan yang berbeda. Brigade Pangan menerapkan sistem bagi hasil langsung dengan pola umum 70:30 atau 50:50 antara brigade dan petani. Skema ini umum dalam model pengelolaan lahan kolektif, di mana biaya, risiko, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan operasional. Sementara itu, BP Cendekia tidak mengandalkan skema bagi hasil langsung, melainkan menjalankan model ekonomi berbasis usaha terpadu. Pendapatan lembaga diperoleh dari berbagai jenis usaha, antara lain pembelian dan

penjualan gabah dan beras, jasa penggilingan melalui koperasi, usaha pengemasan beras komersial, penyewaan alsintan (TR4, rotavator, sprayer, steam unit), serta pengembangan produk turunan seperti kompos, biochar, ternak unggas, ternak ikan, hidroponik, dan penyediaan sarana produksi (pupuk organik cair, asam humat, pupuk hayati cair). Dengan diversifikasi usaha ini, BP Cendekia berperan sebagai ekosistem usaha pertanian terpadu, bukan sekadar pelaku budidaya, sehingga potensi pemasukan lebih luas dan risiko ketergantungan pada satu komoditas dapat ditekan.

Dari sisi skala wilayah, BP mengelola lahan sekitar 150–200 ha, sedangkan BP Cendekia tercatat memiliki cakupan hingga 200 ha. Namun, angka ini tidak dapat dibaca secara identik karena perbedaan model pengelolaan. Pada BP, luasan mencerminkan area yang dikelola operasional brigade, sedangkan pada BP Cendekia menunjukkan wilayah binaan yang dikelola oleh petani dengan pendampingan brigade. Kedua lembaga sama-sama terdaftar dalam sistem SIMLUHTAN, memiliki SK resmi, dan melakukan konsolidasi lahan, sehingga keduanya diakui secara kelembagaan oleh sistem penyuluhan pertanian nasional. Hal ini memastikan legitimasi operasional di lapangan dan membuka akses terhadap kemitraan program pemerintah maupun lembaga pendanaan.

Perbedaan komoditas menjadi aspek identitas kelembagaan yang paling mencolok. Brigade Pangan berfokus pada satu komoditas yaitu padi, yang mencerminkan model spesialisasi. Di sisi lain, BP Cendekia memiliki jangkauan lebih luas mencakup tanaman pangan (padi dan ubi kayu), hortikultura (buah dan sayur), peternakan (ayam KUB, ayam buras, sapi, kambing), dan perikanan (lele). Diversifikasi komoditas memberikan ketahanan usaha yang lebih kuat karena pendapatan tidak bergantung pada satu sektor. Model multiproduk juga memungkinkan lembaga membangun rantai pasok integratif dari hulu ke hilir, termasuk manajemen pupuk organik, benih, dan pakan, sehingga efisiensi ekonomi meningkat dan perputaran modal lebih cepat di tingkat kelembagaan.

Jenis intensifikasi usaha padi juga berbeda. Brigade Pangan menerapkan sistem tanam IP100–IP200, sedangkan BP Cendekia beroperasi pada lahan intensif dengan IP200, menandakan siklus tanam lebih padat dan pemanfaatan lahan lebih optimal. Brigade Pangan Cendekia tidak mengambil alih pengelolaan lahan, tetapi berperan sebagai pendamping yang membantu petani dalam manajemen usaha tani, introduksi teknologi, hingga penerapan paket inovasi. Hal ini dianggap lebih efektif karena tidak mengubah struktur pengelolaan lahan yang sudah menjadi domain petani, tetapi memperkuatnya melalui transfer pengetahuan dan pendampingan intensif. Faktor sumber daya manusia turut membedakan kedua lembaga, meski keduanya sama-sama dihuni generasi produktif. Brigade Pangan beranggotakan pemuda usia 17–39 tahun, sedangkan BP Cendekia berada pada rentang usia lebih dewasa 24–39 tahun. Perbedaan rentang usia ini dapat berimplikasi pada tingkat kemandirian teknis, pengalaman lapangan, dan kapasitas manajerial.

Dalam konteks formalitas administrasi dan komitmen kelembagaan, BP memiliki surat pernyataan terkait SK peningkatan indeks pertanaman dan pengelolaan lahan, sedangkan BP Cendekia menjalankan fungsi tersebut melalui struktur koperasi dan sistem usaha terintegrasi, meski tetap memegang SK formal sebagai brigade. Perbedaan format legalitas ini menunjukkan arah strategi kelembagaan yang berbeda: BP menguatkan lembaga sebagai unit pelaksana budidaya, sedangkan BP Cendekia membangun kelembagaan sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi petani.

Secara keseluruhan, BP lebih tepat dikategorikan sebagai lembaga produksi berbasis tenaga kerja pemuda pertanian, sementara BP Cendekia berkembang sebagai lembaga pendampingan teknis yang terhubung dengan sistem usaha koperasi dan diversifikasi agribisnis. Dengan model ini, BP Cendekia memiliki fleksibilitas lebih besar untuk

menggerakkan inovasi, memperluas sektor usaha, serta mengintegrasikan petani tanpa mengambil alih kontrol lahan, sehingga lebih adaptif dalam pengembangan kelembagaan jangka panjang.

Dalam konteks pemberdayaan petani muda, Brigade Pangan Cendekia merupakan lembaga yang saat ini tengah bertumbuh dan perlu diperkuat dari sisi kelembagaan. Penguatan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa Brigade Pangan Cendekia dapat menjalankan mandatnya secara profesional, terutama dalam kegiatan pendampingan petani, pengelolaan usaha pertanian, serta produksi dan hilirisasi hasil pertanian. Penguatan kelembagaan juga bertujuan meningkatkan efektivitas kerja internal, menciptakan tata kelola organisasi yang lebih baik, serta memastikan lembaga ini mampu menjadi contoh bagi kelompok petani muda lain di wilayah Kabupaten Indramayu. Dengan struktur kelembagaan yang kuat dan sistem kerja yang tertata, Brigade Pangan Cendekia berpotensi menjadi model pemberdayaan petani yang inspiratif dan replikatif.

Selain itu, perbedaan kelembagaan juga cukup signifikan. Jika Brigade Pangan merupakan lembaga yang berdiri sendiri, maka Brigade Pangan Cendekia merupakan bagian integral dari Koperasi Sri Unggul Sejahtera. Dengan demikian, BC memiliki posisi yang kuat dalam struktur koperasi dan dapat mengakses dukungan organisasi secara lebih luas, mulai dari aspek permodalan, pemasaran, hingga pengolahan pascapanen. Posisi ini juga memperkuat prinsip keberlanjutan, karena koperasi memberikan ruang kelembagaan yang stabil dan jangka panjang bagi operasional BC.

6. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui hidroponik

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian muda, BRMP Jawa Barat menyelenggarakan pelatihan budidaya sayuran hidroponik skala pekarangan bagi anggota Brigade Pangan Cendekia di Desa Wanasari. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai budidaya sayuran tanpa tanah yang sederhana, murah, dan dapat diterapkan pada ruang terbatas, khususnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan di lingkungan rumah.

7. Pelatihan pembuatan konten pertanian di media sosial pada Brigade Pangan Cendekia dan Gubug Inovasi

Dalam upaya meningkatkan kemampuan promosi dan pemasaran digital bagi petani muda, BRMP Jawa Barat merencanakan pelatihan pembuatan konten pertanian di media sosial bagi Brigade Pangan Cendekia dan Gubug Inovasi. Pelatihan ini disusun sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kemampuan komunikasi visual dan digital marketing yang saat ini menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan usaha pertanian. Melalui kemampuan membuat konten yang menarik, informatif, dan relevan, para petani muda diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi produk serta meningkatkan nilai tambah usahanya.

Sasaran 2 :	Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan dan Perakitan yang Adaptif
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan kedua, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan. Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2025 terealisasi 140,95 unit sehingga capaian indikator ini sebesar 102,88% dengan kategori **sangat berhasil**. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian target indikator kinerja Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan

Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja			
	Uraian	Target	Capaian	%
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	137 Unit	140,95 Unit	102,88

Indikator kinerja sasaran ini secara keseluruhan telah terealisasi melebihi target, yaitu 140,95 unit. Indikator kinerja ini dicapai melalui produksi benih sumber varietas unggul baru (VUB) padi kelas FS dan SS yang memiliki produktivitas tinggi, disesuaikan preferensi, karakteristik agroekosistem dan sosial budaya masyarakat Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di KP Pusakanagara dan mitra kerjasama kelompok penangkar Dicdaya Mandiri di Kecamatan Comprang, Subang. Lokasi lahan yang digunakan untuk produksi benih padi merupakan lahan sawah irigasi dengan pengelolaan air irigasi yang cukup baik. Produksi benih padi dilaksanakan pada total luas lahan 48 ha yang terdiri dari 15 ha produksi kelas benih FS/BD dan 33 ha produksi kelas benih SS/BP. Total luas lahan produksi benih di KP Pusakanagara seluas 28 ha terdiri dari 15 ha untuk produksi benih kelas FS dan 13 ha untuk produksi kelas SS. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan dan pertimbangan teknis, maka pembagian lahan produksi berdasarkan kelas benih, varietas, dan luasan lahan seperti yang tertera pada Tabel 9.

Tabel 9. Lokasi Lahan produksi benih FS dan SS, Tahun 2025

No	Varietas	Kelas Benih	Luas (Ha)	Lokasi
1	Inpari 36	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
2	Inpari 37	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
3	Inpari 39	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
4	Inpari 48	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
5	Inpari 49	FS/BD	4,0	KP Pusakanagara
6	Cakrabuana	FS/BD	4,0	KP Pusakanagara
7	Situbondo Agritan 01	FS/BD	3,0	KP Pusakanagara
TOTAL FS/BD			15,0	
1	Inpari 32	SS/BP	3,0	Kec. Comprang
	Inpari 32	SS/BP	2,0	Kec. Pusakajaya
2	Inpari 47	SS/BP	5,0	KP Pusakanagara
3	Inpari 48	SS/BP	2,0	KP Pusakanagara
	Inpari 48	SS/BP	3,0	Kec. Pusakajaya
4	Inpari 49	SS/BP	13,0	Kec. Comprang
5	Cakrabuana	SS/BP	5,0	KP Pusakanagara
TOTAL SS/BP			33,0	

Pelaksanaan kegiatan produksi benih padi dimulai dari pengolahan tanah menggunakan traktor dan persemaian benih yang dilakukan terpisah antar varietas. Penanaman dilaksanakan pada akhir Juni hingga Juli 2025 menggunakan bibit berumur 20 hari setelah semai dengan sistem tanam pindah manual dan jarak tanam 30 × 30 cm. Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Pemupukan dilakukan dua tahap menggunakan pupuk NPK dan urea serta didukung aplikasi pupuk organik cair.

Pelaksanaan kegiatan produksi benih padi dimulai dari pengolahan tanah menggunakan traktor dan persemaian benih yang dilakukan terpisah antar varietas. Penanaman dilaksanakan pada akhir Juni hingga Juli 2025 menggunakan bibit berumur 20 hari setelah semai dengan sistem tanam pindah manual dan jarak tanam 30 × 30 cm. Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Pemupukan dilakukan dua tahap menggunakan pupuk NPK dan urea serta didukung aplikasi pupuk organik cair.

Pengendalian OPT difokuskan pada hama tikus yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sejak persiapan lahan hingga fase generatif. Observasi agronomis menunjukkan performa tanaman yang baik dengan tinggi tanaman berkisar 95–118,6 cm dan jumlah anakan produktif tergolong banyak hingga sangat banyak, meskipun kondisi pengairan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan curah hujan.

Untuk menjamin mutu dan kemurnian genetik benih, dilakukan seleksi tanaman (roguing) secara bertahap sejak fase vegetatif hingga fase masak. Seluruh pertanaman dinyatakan lulus pemeriksaan lapangan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) baik untuk kelas benih dasar (FS/BD) maupun benih pokok (SS/BP).

Tabel 10. Realisasi volume benih padi kelas FS yang disertifikasi

No	Varietas	Kelas	GKP (Kg)	Benih Bersih (Kg)
1	Inpari 36	FS	3.518	2.880
2	Inpari 37	FS	5.015	4.010
3	Inpari 39	FS	3.725	3.050
4	Inpari 48	FS	4.992	3.970
5	Inpari 49	FS	11.168	8.730
6	Situbondo BK-01	FS	9.379	7.620
7	Cakrabuana	FS	11.828	10.050
Total			49.545	40.310

Panen dilaksanakan pada awal Oktober 2025 menggunakan mesin *combine harvester* dengan penerapan prosedur pencegahan pencampuran varietas. Total produksi gabah kering panen mencapai 174.114 kg. Setelah melalui proses penjemuran dan pengolahan benih, volume benih bersih yang didaftarkan untuk sertifikasi sebanyak 140.950 kg, terdiri atas 40.310 kg benih kelas FS dan 100.640 kg benih kelas SS. Seluruh benih dinyatakan memenuhi persyaratan mutu berdasarkan hasil uji laboratorium BPSB.

Tabel 11. Realisasi volume benih padi kelas SS yang disertifikasi

No	Varietas	Kelas	GKP (Kg)	Benih Bersih (Kg)
1	Inpari 32	SS	16.714	13.700
2	Inpari 47	SS	19.035	15.250
3	Inpari 48	SS	18.435	14.880
4	Inpari 49	SS	52.087	42.700
5	Cakrabuana	SS	17.630	14.110
Total			123.901	100.640

Benih yang telah disertifikasi dikemas, diberi label, dan disimpan sesuai standar penyimpanan. Hingga akhir Tahun 2025, benih yang disalurkan secara komersial mencapai 2.115 kg dengan nilai penjualan sebesar Rp25.690.000 yang seluruhnya disetorkan sebagai PNBPN BRMP Jawa Barat. Kegiatan produksi benih sumber padi Tahun 2025 terlaksana sesuai perencanaan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja BRMP Jawa Barat dalam penyediaan benih bermutu dan peningkatan PNBPN.

Sasaran 3 :	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja dengan target 83,04 Nilai Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat. Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2025 terealisasi 83,44 Nilai. Capaian nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) berdasarkan penilaian dari Hasil penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih lingkup BRMP Tahun 2025 adalah sebesar 100,48% dengan **kategori sangat berhasil**. Dengan capaian nilai tersebut, indikator kinerja sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM BRMP Jawa Barat tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian target indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat

Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja			
	Uraian	Target	Capaian	%
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,04 Nilai	83,44 Nilai	100,48

Reformasi birokrasi merupakan langkah untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efisien, bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi birokrasi merupakan fondasi penting dalam penataan sistem pemerintahan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan profesional. Tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kinerja aparatur, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan. Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut, instansi pemerintah mengembangkan unit percontohan sebagai pilot project yang dapat direplikasi pada unit kerja lainnya. Implementasi reformasi birokrasi secara konkret di tingkat unit kerja dilakukan melalui pembangunan dan penguatan Zona Integritas.

BRMP Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) telah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang unsur penilaian ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang landasan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRMP Jawa Barat menetapkan dan membangun komponen-komponen yang dipersyaratkan dalam pembangunan ZI. Penilaian Zona Integritas dilaksanakan melalui 6 (enam) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam area perubahan tersebut merupakan area reformasi birokrasi yang menjadi dasar pencapaian dua sasaran utama, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Target kinerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Jawa Barat pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 83,04. Pada tahun 2025, penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu melalui penilaian mandiri Zona Integritas dan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Investigasi, yang selanjutnya diikuti dengan proses rasionalisasi nilai ZI. Penilaian mandiri ZI dilaksanakan melalui mekanisme penilaian silang antar satuan kerja di lingkungan BRMP. Berdasarkan hasil rapat pleno penilaian ZI, BRMP Jawa Barat memperoleh nilai penilaian mandiri sebesar 87,95. Untuk memastikan objektivitas serta mengukur kesesuaian hasil penilaian mandiri, dilakukan penilaian lanjutan oleh Inspektorat Jenderal Investigasi. Dari hasil penilaian tersebut, BRMP Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 82,16. Adanya selisih antara hasil penilaian mandiri dan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Investigasi menjadi dasar dilaksanakannya rasionalisasi nilai ZI, proses rasionalisasi dilakukan agar nilai ZI yang ditetapkan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja dan UPT di lingkungan BRMP. Berdasarkan hasil rasionalisasi, nilai ZI BRMP Jawa Barat tahun 2025 ditetapkan sebesar 83,44.

**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
WBK**

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT		60.00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.00	3.55	6.55	81.93%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	1.82	3.09	4.90	70.05%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.37	3.50	7.87	78.65%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	3.74	4.51	8.24	82.40%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.75	6.88	12.62	84.15%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	3.77	4.59	8.36	83.57%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					48.54	80.90%	OK
B. HASIL		40.00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50			19.72	87.64%	OK
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17.50			15.97	91.25%	OK
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5.00			3.75	75.00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50			15.18	86.75%	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17.50			15.18	86.75%	OK
TOTAL HASIL					34.90	87.25%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					83.44		OK

Gambar 5. Hasil Rasionalisasi Pelaksanaan ZI BRMP Jawa Barat Tahun 2025

Sasaran 4**Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja dengan target 91 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat. Penilaian IKPA terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran. Kualitas perencanaan anggaran terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu revisi DIPA dan deviasi Halaman III DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran memiliki beberapa parameter penilaian yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP serta dispensasi SPM, sedangkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan gabungan nilai kinerja pencapaian output dan ketepatan waktu pelaporan. Kategori nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dibagi menjadi empat tingkatan: **Sangat Baik** (≥ 95), **Baik** (89 hingga < 95), **Cukup** (70 hingga < 89), dan **Kurang** (< 70). Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar **94,30**, sehingga tingkat capaian indikator mencapai **103,62 persen** dengan kategori **"Baik"**. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Jawa Barat ini mencerminkan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output kegiatan).



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	022	018	567296	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT	Nilai	100.00	70.53	100.00	93.33	100.00	93.89	100.00	94.30	100%	0.00	94.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.58	20.00	9.33	10.00	9.39	25.00				
					Nilai Aspek		85.27			96.81		100.00				

Gambar 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat TA. 2025

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja BRMP Jawa Barat dapat dikategorikan berhasil. Beberapa indikator kinerja memperoleh capaian lebih dari 100%. Hal ini dapat dicapai karena komitmen pimpinan beserta segenap jajaran pegawai BRMP Jawa Barat dalam pencapaian dan peningkatan kinerja masing-masing. Pencapaian target dari indikator kinerja disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian target indikator kinerja Nilai IKPA BRMP Jawa Barat

Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja			
	Uraian	Target	Capaian	%
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	91 Nilai	94,30 Nilai	103,62

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun

Capaian kinerja BRMP Jawa Barat antar tahun hanya dilihat dari 2 indikator. Hal ini karena Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat merupakan lembaga baru sebagai transformasi dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat pada tahun 2025. Indikator tersebut adalah 1) jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dan 2) jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Perbandingan pengukuran realisasi capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilakukan pada 2 (dua) indikator yaitu 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan Modernisasi Pertanian dan 4) Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.

- A. IK. 1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Indikator jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun 2025 merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- B. IK. 2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan
Indikator jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- C. IK. 4.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.

Tabel 14. Capaian Target Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BRMP Jawa Barat tahun 2021 sampai 2025

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	103,84	105,06	101,57	100,77	100,48

Gambar 7 menunjukkan grafik persentase capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 100,48% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian capaian ZI tetap berada di atas target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dapat dipertahankan secara konsisten pada tingkat kinerja yang tinggi.



Gambar 7 Perbandingan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Jawa Barat tahun 2021 sampai 2025

D. IK. 5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator baru di tahun 2024 hal ini berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B- 1477/OT.240/A.1/08/2024 hal Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Pertanian. Sebelumnya, sejak tahun 2020, indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Nilai IKPA Tahun 2024 dan 2025 BRMP Jawa Barat disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Jawa Barat tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
	T	R		T	R	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Jawa Barat (Nilai)	91,88	96,61	105,15	91,00	94,30	103,62

Perbandingan capaian IKPA antara tahun 2024 dan tahun 2025 juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan sedikit menurun. Pada tahun 2024, realisasi IKPA mencapai 96,61 atau 105,15% dari target sedangkan pada tahun 2025, realisasi IKPA turun menjadi 94,30 dengan persentase capaian sebesar 103,62%. Penurunan ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2025, seperti penyesuaian kebijakan, perubahan pola kegiatan, atau meningkatnya kompleksitas pelaksanaan program. Namun demikian, capaian IKPA Tahun 2025 tetap berada di atas target dan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih berjalan **efektif dan akuntabel**.

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025, kedua indikator menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2025, namun tetap berada pada kategori melampaui target. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan mempertahankan capaian kinerja sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan kinerja selanjutnya memerlukan strategi yang lebih inovatif dan berfokus pada kualitas pelaksanaan.

3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan di atas, BRMP Jawa Barat juga berhasil mencapai berbagai kinerja lainnya yang mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BRMP Jawa Barat secara keseluruhan. Capaian ini meliputi kegiatan strategis lainnya dan peningkatan kualitas layanan kegiatan dukungan manajemen. Capaian kinerja lainnya BRMP Jawa Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian kinerja lainnya BRMP Jawa Barat Tahun 2025

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	268 orang	268 orang	100%	Berhasil
2	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (<i>ICARE</i>)	1 Lembaga	8 Lembaga	800%	Sangat berhasil
3	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (137 Unit)	137 unit	140,95 unit	102,88%	Sangat berhasil
4	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Berhasil
5	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
6	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
7	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
8	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja kegiatan strategis dan dukungan manajemen BRMP Jawa Barat dapat dikategorikan "**Berhasil**". Hal ini dapat tercapai disebabkan oleh komitmen pimpinan serta segenap jajaran dan pegawai BRMP Jawa Barat dalam pencapaian dan peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja serta kegiatan-kegiatan BRMP Jawa Barat tahun 2025.

Kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian.

1. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Kegiatan ini didanai melalui Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) TA 2025 dan dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan merupakan instrumen strategis dalam mendukung kebijakan Kementerian Pertanian terkait percepatan penerapan standar instrumen pertanian guna meningkatkan mutu, produktivitas, dan daya saing produk pertanian secara berkelanjutan.

Dalam kerangka reformasi kelembagaan dan transformasi pembangunan pertanian, BRMP dibentuk untuk memperkuat peran negara dalam memastikan bahwa standar, regulasi, dan inovasi pertanian dapat diterapkan secara efektif di tingkat lapangan. Sejalan dengan mandat tersebut, kegiatan sosialisasi dan diseminasi standar instrumen pertanian diarahkan untuk menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi operasional oleh penerap standar, khususnya penyuluh pertanian, petani, dan pemangku kepentingan terkait di daerah.

Fokus kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada penerapan IndoGAP Padi (SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik) dan SNI 3211:2009 Manggis. Penetapan kedua standar tersebut didasarkan pada pertimbangan strategis, yaitu padi sebagai komoditas utama penopang ketahanan dan swasembada pangan nasional, serta manggis sebagai komoditas hortikultura unggulan berorientasi ekspor yang memerlukan penguatan jaminan mutu dan keamanan produk. Dengan demikian, kegiatan ini secara langsung mendukung prioritas nasional di sektor pangan dan hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, dan Sumedang, yang merupakan wilayah sentra produksi dan pengembangan komoditas strategis di Provinsi Jawa Barat. Penetapan lokasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas teknis terkait, dengan mempertimbangkan potensi wilayah, kesiapan kelembagaan, tingkat adopsi teknologi, serta relevansi terhadap program strategis Kementerian Pertanian. Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran setelah adanya kepastian penggunaan anggaran PNBP, dengan tetap menjaga efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan mengedepankan pendekatan sosialisasi, diseminasi, dan penguatan kapasitas, melalui pertemuan tatap muka, diskusi terarah, serta evaluasi capaian pembelajaran peserta. Sasaran kegiatan meliputi penyuluh pertanian, petani, penangkar benih, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Secara keseluruhan, jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini mencapai 268 orang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan.

Dari sisi **output**, kegiatan ini menghasilkan tersosialisasikannya standar instrumen pertanian kepada penerap standar di wilayah sasaran, meningkatnya pemahaman peserta terhadap substansi standar, serta tersedianya umpan balik lapangan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan penerapan standar. Materi yang disampaikan mencakup aspek budidaya berstandar, pengelolaan sarana produksi, pengendalian risiko usaha tani, serta pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk.

Dari sisi **outcome**, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan penguatan keterampilan peserta dalam menerapkan standar instrumen pertanian. Peserta menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya praktik budidaya yang sesuai standar, efisiensi penggunaan input produksi, serta penerapan prinsip pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada komoditas manggis, kegiatan ini mendorong meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan mutu produk sebagai prasyarat peningkatan daya saing dan akses pasar.

Tabel 17. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

No	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Materi	Peserta	Jumlah peserta
1	Karawang	27 November 2025	IndoGAP (SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik)	Penyuluh dan kepala UPTD Pertanian se-Kabupaten Karawang	50
2	Subang	04 Desember 2025	IndoGAP (SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik)	Penyuluh dan kepala UPTD Pertanian se-Kabupaten Subang	70
3	Purwakarta	04 Desember 2025	SNI 3211:2009 Manggis	Penyuluh, POPT, dan Petani Manggis	30
4	Purwakarta	05 Desember 2025	IndoGAP (SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik)	Penyuluh, POPT dan petani	30
5	Sumedang	06 Desember 2025	IndoGAP (SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik)	Penyuluh, POPT, dan petani	40
6	Sumedang	12 Desember 2025	IndoGAP (SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik)	Penyuluh, POPT, dan petani	48
Jumlah Total					268

Dari sisi **dampak**, kegiatan sosialisasi dan diseminasi standar instrumen pertanian berkontribusi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian, mempercepat adopsi standar di tingkat lapangan, serta mendukung peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian daerah. Dalam jangka menengah dan panjang, kegiatan ini diharapkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian, khususnya peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan keberlanjutan usaha tani, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.



Gambar 8. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian di Kabupaten Karawang



Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian di Kabupaten Subang



Gambar 10. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 3211:2009 Manggis di Kabupaten Purwakarta



Gambar 11. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik di Kabupaten Purwakarta



Gambar 12. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik di kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang.



Gambar 13. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian SNI 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik di kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2025 dinilai berjalan dengan baik dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan implementasi standar instrumen pertanian sebagai fondasi pembangunan pertanian yang **maju, mandiri, dan modern**, khususnya di Provinsi Jawa Barat, serta dapat dijadikan model pelaksanaan kegiatan serupa di wilayah lain.

2. Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (ICARE)

Program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment*) di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut, dilaksanakan sebagai respon atas tantangan rendahnya produktivitas, mutu, dan daya saing usaha tani yang dipengaruhi keterbatasan akses pasar, adopsi teknologi, infrastruktur hilir, permodalan, serta kapasitas teknis dan kewirausahaan pelaku usaha. Garut dipilih karena merupakan sentra utama kentang di Jawa Barat (kontribusi produksi >62%) dengan luasan tanam rata-rata sekitar 7.034 ha dan produktivitas rata-rata 23,42 ton/ha, serta memiliki potensi kuat untuk pengembangan domba (ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit Domba Garut) yang terintegrasi dengan sistem pertanian dan pakan hijauan. Fokus komoditas kentang dan domba pada lima kecamatan lokasi ICARE (Pasirwangi, Cikajang, Cisurupan, Sukaresmi, dan Cigedug) diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan dan rantai nilai yang berkelanjutan

secara lingkungan, sosial, dan ekonomi serta bersifat inklusif, termasuk mendorong keterlibatan petani perempuan dan petani muda, sekaligus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sebagai pendekatan transformasi pertanian di tingkat lapangan.

Pada Tahun 2025, tujuan ICARE difokuskan pada: (1) merumuskan kerja sama/kolaborasi dengan mitra swasta dan pemangku kepentingan untuk pengembangan agribisnis kawasan kentang dan domba; (2) memperluas jangkauan dan efisiensi layanan teknis melalui pengadaan *laboratory mobile vehicle* dan *mobile equipment* sebagai layanan penunjang rantai nilai; (3) melaksanakan pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial korporasi petani; (4) memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok dan korporasi; (5) menyusun rencana bisnis koperasi untuk komoditas kentang dan domba; (6) memfasilitasi akses pembiayaan dan komersialisasi melalui matching grant secara inklusif; (7) mendorong penerapan digitalisasi budidaya kentang, budidaya domba, dan manajemen koperasi; (8) memperkuat kapasitas pelaku rantai nilai; (9) meningkatkan kapasitas SDM pemerintah (teknis dan manajerial) dalam mendukung pengembangan kawasan; (10) menyediakan informasi, administrasi, pengarsipan, dan pelaporan yang akurat; (11) menyusun laporan evaluasi efektivitas, efisiensi, dampak, keberlanjutan, dan capaian PDO; (12) mengelola dan mendiseminasikan praktik baik melalui platform manajemen pengetahuan; serta (13) menyiapkan dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial agar setiap tahapan program berjalan berkelanjutan dan inklusif.

Kegiatan Pengembangan *Platform* Pemangku Kepentingan Publik-Swasta (A1.d) pada tahun 2025 dilaksanakan untuk membangun dan mengoperasionalkan platform kolaborasi publik-swasta dalam rangka penguatan pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas kentang dan domba di Kabupaten Garut. Rangkaian kegiatan antara lain koordinasi lintas sektor dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Garut; serta Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Garut untuk menyelaraskan kebijakan daerah, mengidentifikasi peluang pasar, serta menjajaki kemitraan strategis bagi koperasi ICARE. Koordinasi ini menghasilkan komitmen awal dukungan KADIN dan perangkat daerah dalam bentuk fasilitasi *business matching*, promosi produk lokal, penguatan kapasitas kewirausahaan, serta peluang integrasi koperasi sebagai pemasok pangan, termasuk untuk skema pemenuhan kebutuhan gizi dan pasar modern.

Selanjutnya, kegiatan survei identifikasi dan fasilitasi kemitraan pada tujuh koperasi produsen ICARE memberikan gambaran rinci mengenai status kemitraan eksisting, LoI, dan PKS, serta kebutuhan spesifik koperasi terhadap mitra hulu (saprotan, benih, alsintan), hilir (off-taker, pemasaran), dan permodalan. Hasil survei menunjukkan sebagian koperasi telah memiliki PKS aktif, sementara koperasi lainnya memerlukan fasilitasi pembakuan LoI menjadi PKS, perpanjangan kerja sama, serta penguatan model bisnis kemitraan. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi tindak lanjut berupa legal drafting PKS, penguatan monitoring kemitraan, dan perancangan model kios saprotan bersama berbasis koperasi.

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian koordinasi dan survei identifikasi kemitraan telah menghasilkan capaian konkret berupa terbentuknya dan/atau diperkuatnya dokumen kerja sama formal (MoU/PKS) antara koperasi ICARE dengan mitra usaha. Hasil fasilitasi menunjukkan bahwa sejumlah koperasi telah memiliki PKS aktif dengan mitra pemasaran dan pelaku usaha, sementara koperasi lainnya berada pada tahap pembakuan LoI menjadi PKS atau penyusunan dan perpanjangan MoU sebagai dasar kerja sama jangka menengah. Capaian MoU/PKS tersebut mencakup kerja sama pada aspek penyediaan sarana produksi,

pemasaran komoditas kentang dan domba, pemanfaatan hasil samping dan limbah ternak, serta dukungan pendampingan teknis dan akses pasar. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum dialog dan penjajakan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan kepastian hukum dan keberlanjutan kemitraan melalui dokumen kerja sama yang terverifikasi, yang selanjutnya menjadi landasan implementasi rencana bisnis koperasi dan penguatan rantai nilai kawasan ICARE di Kabupaten Garut.

Tahap konsolidasi selanjutnya dilaksanakan melalui FGD Pengembangan Platform Kolaborasi Publik-Swasta yang mempertemukan koperasi ICARE dengan pemerintah daerah, mitra swasta, dan pemangku kepentingan terkait. FGD berfungsi sebagai forum *business matching* awal untuk mengidentifikasi minat nyata mitra potensial pada sektor hulu, on-farm, hilir, pembiayaan, dan pemasaran, sekaligus memetakan kesiapan koperasi berdasarkan profil dan rencana bisnisnya. Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman awal mengenai arah kolaborasi, dukungan kebijakan daerah (pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM), serta komitmen mitra swasta dalam pendampingan teknis, penyediaan input, akses pasar, dan pembiayaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan A1.d pada tahun 2025 telah membentuk fondasi platform kolaborasi publik-swasta yang terstruktur sebagai titik awal pengembangan kemitraan berkelanjutan bagi penguatan rantai nilai kentang dan domba di Kabupaten Garut.

Pelaksanaan kegiatan Meningkatkan Layanan Publik untuk Dukungan Rantai Nilai (A1.e) diarahkan untuk memperkuat peran layanan teknis BRMP Jawa Barat dalam mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani pada komoditas prioritas di lokasi ICARE. Fokus utama kegiatan ini adalah penyediaan dan **pemanfaatan** peralatan laboratorium keliling, berupa *Rapid Soil Check* (RSC), *centrifuge*, dan *genset portable*, yang memungkinkan dilakukannya analisis kondisi tanah secara cepat dan langsung di lapangan. Kehadiran layanan ini menjadi respon atas kebutuhan petani akan informasi teknis yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan budidaya.

Berdasarkan sisi penguatan rantai nilai, kegiatan A1.e berkontribusi pada peningkatan kualitas input produksi di hulu, yang menjadi prasyarat penting bagi peningkatan mutu dan kontinuitas pasokan produk pertanian. Informasi hasil *Rapid Soil Check* menjadi landasan penerapan praktik budidaya yang lebih tepat, sejalan dengan prinsip pertanian cerdas iklim dan efisiensi penggunaan input. Dampak tidak langsung dari kegiatan ini adalah meningkatnya peluang petani untuk memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan pasar dan mitra hilir, sehingga memperkuat keterkaitan antara layanan publik, produksi, dan akses pasar.

Kegiatan Dukungan Pengembangan Korporasi Petani (A2.a) difokuskan pada penguatan kelembagaan korporasi petani berbadan hukum koperasi sebagai fondasi pengembangan usaha agribisnis di kawasan ICARE Jawa Barat. Pendampingan dilaksanakan melalui penguatan koperasi petani, pembaruan data keanggotaan dan kepemilikan lahan, serta penilaian kesiapan dan kinerja kelembagaan. Kegiatan ini didukung dengan penguatan struktur organisasi, tata kelola, serta mekanisme kerja koperasi, disertai pendampingan operasional awal dan monitoring rutin oleh Site Manager dan Fasilitator Lapangan, untuk memastikan fungsi kelembagaan berjalan.

Hasil pelaksanaan kegiatan A2.a menunjukkan meningkatnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan koperasi. Penguatan kelembagaan ini menjadi basis penting bagi integrasi petani ke dalam sistem

usaha kolektif yang lebih terorganisir, sekaligus meningkatkan kesiapan koperasi dalam menerima intervensi lanjutan, yaitu peningkatan kapasitas teknis dan manajerial (A2.b), penyusunan rencana bisnis (A2.c), dan akses pembiayaan melalui skema *matching grant* (A2.d). Kegiatan A2.a berkontribusi langsung terhadap penguatan rantai nilai pertanian yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pasar di lokasi ICARE Jawa Barat.

Kegiatan Memperkuat Keterampilan Teknis, Bisnis, Keuangan, dan Organisasi Petani dalam Kelompok dan Korporasi Petani (A2.b) dilaksanakan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan yang terintegrasi, mencakup aspek teknis produksi seperti penerapan GAP dan GHP komoditas kentang, GFP domba, serta pengolahan produk turunan. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan penguatan manajemen organisasi koperasi serta pengelolaan usaha dan keuangan, untuk membangun kapasitas petani dan pengurus koperasi secara menyeluruh. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan penerapan hasil bimbingan teknis/pelatihan di lapangan, yang dilengkapi dengan evaluasi peningkatan kapasitas peserta sebagai dasar perbaikan dan penguatan kegiatan selanjutnya.

Capaian kegiatan A2.b tercermin dari meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial petani serta pengurus koperasi dalam mengelola usaha tani dan koperasi secara lebih profesional dan berorientasi pasar. Dari sisi kinerja program, kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap indikator Komponen A, khususnya persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani, serta mendukung indikator Komponen B terkait peningkatan jumlah petani yang mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik. Penguatan kapasitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan telah meningkatkan kesiapan pelaku usaha tani dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki tata kelola usaha, dan memperkuat orientasi pasar dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga mendukung keberlanjutan pengembangan korporasi petani di kawasan ICARE.

Kegiatan Pengembangan Rencana Bisnis Korporasi Petani yang Layak (A2.c) difokuskan pada penyusunan rencana bisnis yang layak, terstruktur, dan berorientasi pasar sebagai prasyarat utama penguatan usaha koperasi dan penyaluran pembiayaan melalui skema *matching grant*. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui workshop bantuan pemerintah dalam bentuk barang, pendampingan penyusunan rencana bisnis, pembahasan tata kelola usaha dan aset, penyusunan SOP pengelolaan *matching grant*, serta pengisian *readiness checklist* untuk menilai kesiapan koperasi dari aspek teknis, kelembagaan, dan keuangan. Pendekatan ini dilakukan agar rencana bisnis yang disusun tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan kelayakan usaha dan keberlanjutan bisnis korporasi petani.

Berdasarkan capaian hingga tahun 2025, kegiatan A2.c telah menghasilkan 7 dokumen rencana bisnis Korporasi Petani, dengan 6 rencana bisnis telah didukung melalui pembiayaan *matching grant*, yang mencakup komoditas kentang dan domba sesuai potensi kawasan ICARE Jawa Barat. Capaian ini berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja Komponen A, khususnya indikator jumlah rencana bisnis/usaha korporasi petani yang didukung melalui hibah pendamping, serta menjadi fondasi bagi pencapaian indikator lanjutan berupa peningkatan kinerja usaha dan keuntungan koperasi dalam jangka menengah. Oleh karena itu, A2.c berperan strategis dalam memperkuat rantai nilai pertanian melalui pengembangan korporasi petani yang lebih mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

Kegiatan Penyediaan *Matching Grant* Korporasi Petani untuk Pembiayaan Bersama Kebutuhan Bisnis Awal Korporasi Petani (A2.d) dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan penetapan koperasi penerima berdasarkan hasil penilaian kinerja usaha dan kelayakan kelembagaan. Pada tahun 2025, sebanyak 6 dari 7 koperasi dinyatakan layak menerima dukungan pendanaan dengan total alokasi sebesar Rp5.262.884.500,-, yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha terutama budidaya komoditas kentang dan domba sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun. Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan prinsip pembiayaan bersama (*cost-sharing*) sehingga mendorong komitmen koperasi dalam pengelolaan aset dan pelaksanaan kegiatan usaha secara bertanggung jawab.

Dari sisi capaian hasil, implementasi kegiatan A2.d berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja Komponen A, khususnya jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping (*matching grant*), serta menjadi prasyarat bagi pencapaian indikator lanjutan berupa koperasi petani yang memperoleh keuntungan setelah dua tahun menerima pembiayaan. Dukungan pembiayaan melalui *matching grant* tidak hanya meningkatkan skala dan efisiensi usaha koperasi, tetapi juga memperkuat disiplin tata kelola, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta kemampuan koperasi dalam mengelola risiko usaha. Oleh karena itu, A2.d berperan strategis dalam mendorong transformasi koperasi petani dari penerima bantuan menjadi pelaku agribisnis yang lebih mandiri, *bankable*, dan terintegrasi dalam rantai nilai pertanian yang berkelanjutan.

Kegiatan **B1.d** dalam Program ICARE Jawa Barat difokuskan pada pengarusutamaan pemanfaatan teknologi digital sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing petani serta koperasi dalam rantai nilai pertanian. Strategi digitalisasi dirancang berbasis data baseline dengan pendekatan adaptif, yaitu memanfaatkan platform yang telah akrab digunakan oleh petani seperti WhatsApp, Facebook, dan YouTube, untuk menekan hambatan adopsi teknologi. Implementasi kegiatan menekankan peran *Technology Helper* (TH) sebagai jembatan digital yang menjembatani kesenjangan literasi teknologi di tingkat akar rumput, melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi berkembang menjadi instrumen agribisnis yang produktif.

Pada tahun 2025, pelaksanaan B1.d diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas *Technology Helper*, Koperasi Digital, dan Workshop Koperasi *Go Online* yang menjangkau ratusan peserta dari unsur penyuluh, pengurus koperasi, petani milenial, aparatur desa, dan fasilitator lapangan di lima lokasi kawasan ICARE. Kegiatan ini membekali peserta dengan keterampilan teknis penggunaan perangkat digital, *troubleshooting*, pemanfaatan aplikasi produktivitas dan media sosial, serta strategi digital marketing dan pengelolaan koperasi berbasis sistem digital. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam memanfaatkan teknologi untuk penguatan manajemen, pemasaran, dan layanan usaha, meskipun masih ditemui tantangan terkait keterbatasan literasi digital lanjutan, ketersediaan perangkat, dan akses internet. Secara keseluruhan, kegiatan B1.d berperan penting dalam memperkuat ekosistem digital pertanian dan koperasi sebagai fondasi transformasi rantai nilai yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan ICARE Jawa Barat.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Pelaku Rantai Nilai (B2.a) dalam Program ICARE Jawa Barat dilaksanakan untuk mendukung pengembangan koperasi dan rantai nilai komoditas kentang dan domba melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha/UMKM di wilayah Garut. Berdasarkan hasil seleksi, sebanyak **30 pelaku UMKM** yang memiliki

keterkaitan langsung dengan komoditas sasaran ditetapkan sebagai peserta binaan. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan identifikasi kebutuhan usaha peserta untuk menyusun materi bimbingan teknis yang relevan dan aplikatif. Enam tema utama ditetapkan sebagai fokus penguatan kapasitas, yaitu motivasi usaha untuk penguatan kapasitas pelaku rantai nilai, *Good Manufacturing Process* (GMP), manajemen produk dan pengemasan, manajemen SDM dan administrasi digital, digital marketing, serta strategi pemasaran ekspor, yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan narasumber kompeten dari praktisi dan akademisi.

Pelaksanaan bimbingan teknis menunjukkan hasil positif berupa meningkatnya motivasi, pemahaman, dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha secara lebih profesional. Peserta mulai menunjukkan perubahan pola pikir menuju pengelolaan usaha yang lebih tertata, dengan komitmen untuk menerapkan prinsip keamanan pangan melalui GMP, memperbaiki alur produksi dan pengemasan, memperkuat manajemen SDM dan administrasi digital, serta membangun identitas merek dan strategi pemasaran digital yang lebih terarah. Selain itu, pengenalan strategi pemasaran ekspor membuka wawasan peserta terhadap peluang pasar internasional dan kesiapan peningkatan kualitas produk. Secara keseluruhan, kegiatan B2.a berkontribusi dalam memperkuat kapasitas pelaku rantai nilai, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendukung integrasi koperasi dan pelaku usaha lokal dalam rantai nilai pertanian yang lebih berkelanjutan di kawasan ICARE Jawa Barat.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah (B2.b) dilaksanakan untuk memperkuat peran aparatur pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan rantai nilai pertanian di kawasan ICARE Jawa Barat. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), khususnya penyuluh pertanian dan pejabat teknis daerah, agar mampu mendukung pengembangan korporasi petani, penerapan teknologi pertanian, serta pengelolaan usaha agribisnis secara lebih efektif. Hingga tahun 2025, kegiatan ini telah menjangkau lebih dari 400 ASN, yang mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis terkait fasilitasi agribisnis kawasan, pengelolaan keuangan dan administrasi, pengembangan produk turunan komoditas kentang dan domba, serta strategi pemasaran menuju pasar ekspor.

Berdasarkan capaian hasil, kegiatan B2.b berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja Komponen B, khususnya indikator jumlah pejabat publik dan penyuluh pertanian yang dilatih untuk memfasilitasi pengembangan rantai nilai dan memberikan layanan pertanian, yang menunjukkan capaian mendekati target yang ditetapkan. Penguatan kapasitas ASN ini meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap korporasi petani dan pelaku rantai nilai, sekaligus memperkuat sinergi antara intervensi teknis, kelembagaan, dan pembiayaan dalam Program ICARE. Kegiatan B2.b berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan kawasan pertanian melalui dukungan SDM pemerintah yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pasar.

Pelaksanaan Komponen C dilaksanakan mendukung terwujudnya seluruh rangkaian Program ICARE berjalan tertib, terkoordinasi, dan akuntabel. Aktivitas manajemen program menghasilkan tersedianya sistem administrasi, pengarsipan data, dan penyediaan informasi kegiatan yang mendukung kelancaran operasional lintas komponen. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan data capaian dan laporan kinerja sebagai dasar pengendalian pelaksanaan program dan pengambilan keputusan

berbasis bukti. Selain itu, kegiatan manajemen pengetahuan mendokumentasikan praktik baik dan pembelajaran program. Penerapan *Environmental and Social Framework* (ESF) mendukung agar setiap kegiatan ICARE dilaksanakan sesuai prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Secara keseluruhan, Komponen C berperan penting dalam menjaga kualitas implementasi program serta mendukung pencapaian tujuan dan indikator kinerja ICARE 2025.

Dokumentasi Kegiatan Program ICARE 2025



Gambar 14. Kegiatan A1.d. Pengembangan Platform Pemangku Kepentingan Publik-Swasta



Gambar 15. Kegiatan A1.e. Meningkatkan Layanan Publik untuk Dukungan Rantai Nilai



Gambar 16. Kegiatan A2.a. Dukungan Pengembangan Korporasi Petani



Gambar 17. Kegiatan A2.b. Memperkuat Keterampilan Teknis, Bisnis, Keuangan, dan Organisasi Petani dalam Kelompok dan Korporasi Petani



Gambar 18. Kegiatan A2.c Pengembangan Rencana Bisnis Korporasi Petani yang Layak



Gambar 19. Kegiatan A2.d. Penyediaan Matching Grant Korporasi Petani untuk Pembiayaan Bersama Kebutuhan Bisnis Awal Korporasi Petani



Gambar 20. Kegiatan B1.d. Mengarusutamakan Penggunaan Teknologi untuk Mengatasi Hambatan Rantai Nilai di Bidang Pertanian



Gambar 21. Kegiatan B2.a. Memperkuat Kapasitas Pelaku Rantai Nilai



Gambar 22. Kegiatan B2.b. Pelatihan untuk Personel Sektor Publik



Gambar 23. Kegiatan C1. Manajemen Program





Gambar 26. Kegiatan C3. Knowledge Management

3. Produksi Benih Padi

Penyediaan benih padi unggul dan bermutu sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi. Penggunaan benih unggul yang disesuaikan dengan kondisi lahan juga menjadi penting untuk memastikan hasil yang optimal. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Jawa Barat yang merupakan UPT BRMP di daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, salah satunya yaitu melaksanakan produksi benih sumber. BPMP Jawa Barat pada tahun anggaran 2025 merencanakan melakukan produksi benih sumber padi kelas FS dan SS. Diharapkan melalui kegiatan ini selain untuk memenuhi sebagian kebutuhan benih sumber bermutu di Jawa Barat, juga dapat mendukung pencapaian swasembada pangan. Tujuan kegiatan produksi benih padi tahun 2025 yaitu: Memproduksi benih sumber varietas unggul baru (VUB) padi sebanyak 137 ton yang terdiri dari 37 ton kelas FS dan 100 ton kelas SS yang memiliki produktivitas tinggi, disesuaikan dengan preferensi, karakteristik agroekosistem, dan sosial-budaya masyarakat Jawa Barat; 2) Menyebarluaskan benih sumber VUB padi yang dihasilkan oleh BRMP Jawa Barat ke wilayah sentra padi di Jawa Barat.

Manfaat dari kegiatan produksi benih padi adalah untuk percepatan diseminasi dan penggunaan VUB padi di Jawa Barat dan secara luas berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas padi di Jawa Barat, serta berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan dan meningkatnya pendapatan petani. Kegiatan ini dilaksanakan di KP Pusakanagara dan mitra kerjasama kelompok penangkar Dicdaya Mandiri di Kecamatan Compreng, Subang. Lokasi lahan yang digunakan untuk produksi benih padi merupakan lahan sawah irigasi dengan pengelolaan air irigasi yang cukup baik. Produksi benih padi dilaksanakan pada total luas lahan 48 ha yang terdiri dari 15 ha produksi kelas benih FS/BD

dan 33 ha produksi kelas benih SS/BP. Total luas lahan produksi benih di KP Pusakanagara seluas 28 ha terdiri dari 15 ha untuk produksi benih kelas FS dan 13 ha untuk produksi kelas SS. Hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Koordinasi internal dan eksternal

Koordinasi telah dilaksanakan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan produksi benih padi tahun 2025, meliputi kordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal dilakukan dalam bentuk pertemuan bersama anggota tim menyusun perencanaan kegiatan di lapangan untuk pencapaian out put kegiatan.



Gambar 27. Koordinasi internal dengan anggota tim UPBS BRMP Jawa Barat

Hasil koordinasi internal meliputi:

- 1) Penetapan blok lahan yang akan digunakan untuk produksi benih di lahan IP2MP Pusakanagara baik FS maupun SS. Blok lahan dikelompokkan berdasarkan kelas benih yang akan diproduksi
- 2) Kesepakatan varietas padi yang akan diproduksi terdiri dari 9 varietas (7 varietas kelas FS dan 5 varietas kelas SS).
- 3) Identifikasi dan kesiapan sarana dan prasarana produksi benih di lapangan
- 4) Penetapan jadwal percepatan pengolahan lahan, dengan mencermati jadwal air irigasi yang masuk ke lahan KP IP2MP Pusakanagara.

Koordinasi eksternal telah dilakukan baik di tingkat daerah (*stakeholders* di Provinsi dan Kabupaten) maupun pusat. Koordinasi dengan Balai Besar Perakitan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi (BBRMP Padi) Sukamandi dilakukan terkait dengan informasi kesesuaian VUB padi untuk wilayah Jawa Barat dan ketersediaan benih sumber VUB padi yang tersedia. Komunikasi dilakukan baik secara zoom maupun saluran telepon.

Koordinasi di tingkat provinsi dilakukan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan BPSBTPH Provinsi Jawa Barat terkait rencana produksi benih padi yang akan dilakukan oleh BRMP Jawa Barat. Di tingkat kabupaten koordinasi dilakukan dengan BPSB wilayah Subang terkait penyelesaian pendaftaran sertifikasi benih yang akan dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan bersama calon mitra kerjasama produksi benih yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Kerjasama dengan mitra akan dilaksanakan pada lahan seluas 20 ha dengan sistem sewa lahan dan kerjasama prosesing benih. Lokasi lahan produksi berada di Kecamatan Compreng dan Pusakajaya.

2. Produksi benih padi

Pelaksanaan produksi benih didahului dengan identifikasi dan plotting lahan baik di lokasi mitra maupun di KP Pusakanagara. Lokasi lahan yang digunakan untuk produksi benih padi merupakan lahan sawah irigasi dengan pengelolaan air irigasi yang cukup baik. Produksi benih padi dilaksanakan pada total luas lahan 48 ha yang terdiri dari 15 ha produksi kelas benih FS/BD dan 33 ha produksi kelas benih SS/BP. Total luas lahan produksi benih di KP Pusakanagara seluas 28 ha terdiri dari 15 ha untuk produksi benih kelas FS dan 13 ha untuk produksi kelas SS.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan dan pertimbangan teknis, maka pembagian lahan produksi berdasarkan kelas benih, varietas, dan luasan lahan seperti yang tertera pada Tabel 18.

Tabel 18. Lokasi Lahan produksi benih FS dan SS, Tahun 2025

No	Varietas	Kelas Benih	Luas (Ha)	Lokasi
1	Inpari 36	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
2	Inpari 37	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
3	Inpari 39	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
4	Inpari 48	FS/BD	1,0	KP Pusakanagara
5	Inpari 49	FS/BD	4,0	KP Pusakanagara
6	Cakrabuana	FS/BD	4,0	KP Pusakanagara
7	Situbondo Agritan 01	FS/BD	3,0	KP Pusakanagara
TOTAL FS			15,0	
1	Inpari 32	SS/BP	3,0	Kec. Compreng
	Inpari 32	SS/BP	2,0	Kec. Pusakajaya
2	Inpari 47	SS/BP	5,0	KP Pusakanagara
3	Inpari 48	SS/BP	2,0	KP Pusakanagara
	Inpari 48	SS/BP	3,0	Kec. Pusakajaya
4	Inpari 49	SS/BP	13,0	Kec. Compreng
5	Cakrabuana	SS/BP	5,0	KP Pusakanagara
TOTAL SS			33,0	

Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah dilakukan secara sempurna, pengolahan dilakukan dengan menggunakan traktor (Gambar 28). Penyingkalan tanah untuk membalikkan tanah dan menggemburkan. Penyingkalan bertujuan untuk mematikan sumber hama dan penyakit dalam tanah. Selanjutnya pengolahan kedua untuk melumpurkan dan meratakan tanah hingga siap tanam.



Gambar 28. Pengolahan lahan produksi benih padi di KP Pusakanagara, pada MT-2 2025

Persemaian Benih

Benih disemai secara terpisah untuk masing-masing varietas dan luasan lahan (Gambar 30). Luas persemaian yang digunakan $\pm 200 \text{ m}^2$ untuk 1 ha luas pertanaman padi. Sebelum disemai benih direndam selama 2 hari dan diperam 1-2 hari hingga keluar radikula kemudian ditebar di persemaian secara merata.



Gambar 29. Persemaian benih kegiatan produksi benih padi di KP Pusakanagara dan mitra, Tahun 2025

Pertumbuhan benih di persemaian cukup beragam diantara varietas yang digunakan. Namun secara umum bibit di persemaian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemeliharaan bibit di persemaian yang dilakukan diantaranya pemupukan dan pengendalian OPT dengan cara monitoring terhadap indikasi serangan OPT di lapangan terutama terhadap adanya penerbangan ngengat di persemaian dan pengumpulan kelompok telur.

Selain itu, untuk mengendalikan serangan hama tikus dilakukan upaya pengemposan belerang, pemasangan pagar plastik TBS disekeliling persemaian, penggunaan rodentisida dan pemasangan alat perangkap.

Penanaman

Penanaman dilakukan mulai dari akhir bulan Juni hingga Juli 2025 (Gambar 31). Umur bibit saat pindah tanam yaitu 20 hss (hari setelah semai). Bibit padi ditanam dengan sistem tanam pindah secara manual dengan jarak tanam tegel $30 \times 30 \text{ cm}$, sebanyak 2-3 bibit per lubang. Penggunaan umur bibit muda saat tanam dapat mendukung pertumbuhan tanaman dengan memberikan jumlah anakan aktif dan anakan produktif yang lebih banyak (Permadi *et al.*, 2020). Berdasarkan hasil penelitian bahwa interaksi antara umur bibit 20 hari dengan jumlah bibit 3 batang per lubang mampu memberikan hasil panen lebih tinggi (Puspitasari *et al.*, 2024). Sisa bibit ditanam di pinggir petakan sesuai dengan varietas dan kelas benihnya, untuk dipergunakan untuk menyulam tanaman yang mati. Penyulaman dilakukan maksimal saat umur tanaman 10 HST.



Gambar 30. Penanaman padi, MK I Tahun 2025

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan dan pengendalian OPT. Dosis pupuk kimia yang diberikan terdiri dari 200 kg NPK + 200 kg urea. Pupuk diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pemupukan pertama umur 7-10 HST terdiri dari 100 kg NPK+50 kg urea, dan pemupukan kedua pada umur 21-25 HST terdiri dari 100 kg NPK+150 kg urea. Pupuk diaplikasikan dengan cara disebar di lahan sawah (Gambar 32).

Selain pupuk kimia, juga diaplikasikan pupuk organik cair (POC) AGN sebanyak 4 kali selama masa pertumbuhan padi yaitu pada umur 15 HST, 30 HST, 45 HST dan 60 HST. Dosis pemberian POC AGN sebanyak 1 L/ha setiap kali aplikasi atau total 4 L per hektar.



Gambar 31. Pemupukan

Pemberian POG pada tanaman padi bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Selain itu, pemberian POC dapat meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dan memperkuat sistem perakaran, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Pengendalian OPT yang telah dilakukan utamanya untuk mengendalikan serangan hama tikus yang hingga kini masih menyerang pertanaman padi di lokasi KP Pusakanagara. Upaya pengendalian tikus sudah dilakukan sejak persiapan olah lahan hingga sekarang, yaitu melalui pengemposan lubang aktif, pengumpanan dengan menggunakan rodentisida, penggunaan pertanaman perangkap, bubu perangkap, serta sanitasi lingkungan (Gambar 32). Pengendalian hama tikus dilakukan secara rutin melalui gropyokan dan pengemposan di lokasi KP Pusakanagara bersama-sama dengan petani seminggu sekali. Pada fase generatif tanaman pelaksanaan pengendalian hama tikus ditingkatkan menjadi 2 kali seminggu.



Gambar 32. Pengendalian hama tikus

Performa Agronomis Tanaman

Observasi dilakukan terhadap karakter agronomis tanaman padi (tinggi tanaman dan jumlah anakan) pada seluruh varietas dan kelas benih yang diproduksi. Observasi dilakukan pada setiap tahap pertumbuhan tanaman yaitu fase vegetatif aktif, fase berbunga dan fase masak. Hasil observasi terhadap karakter agronomis tanaman pada masing-masing varietas dan kelas benih disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 19. Karakter agronomis varietas padi pada kegiatan produksi benih sumber padi kelas FS/BD pada MT II/2025 di Kabupaten Subang

No	Varietas	Tinggi Tanaman (cm)			Jumlah Anakan		
		Fase vegetatif	Fase berbunga	Fase masak	Fase vegetatif	Fase berbunga	Fase masak
1	Inpari 36	97,6	107,8	109,4	43,0	18,4	19,4
2	Inpari 37	100,0	107,4	109,4	41,2	20,6	21,4
3	Inpari 39	80,2	97,6	101,4	24,0	16,4	16,4
4	Inpari 48	105,0	112,0	113,8	28,4	26,4	26,4
5	Inpari 49	86,4	109,0	110,0	25,0	13,2	15,2
6	Situbondo BK-01	91,0	97,0	99,0	20,0	17,6	17,6
7	Cakrabuana	72,8	93,6	95,8	20,4	15,6	15,6

Hasil observasi terhadap karakter tinggi tanaman padi diketahui bahwa rata-rata tinggi tanaman padi berkisar antara 95-118,6 cm. Berdasarkan *Standard Evaluation System for Rice* (2013), tanaman padi yang memiliki tinggi <110 cm termasuk kategori pendek (Situbondo BK-01 dan Cakrabuana), dan tanaman padi dengan tinggi antara 110-130 cm termasuk kategori sedang. Karakter tinggi tanaman berkaitan dengan tingkat kerentanan tanaman terhadap kerebahan. Tanaman padi yang memiliki performa batang yang tidak terlalu tinggi relatif tahan terhadap kerebahan akibat terpaan angin kencang. Faktor kerebahan pada tanaman padi dapat menyebabkan penurunan hasil panen (Sutaryo dan Sudaryono, 2012).

Tabel 20. Karakter agronomis varietas padi pada kegiatan produksi benih sumber padi kelas SS/BP pada MT II/2025 di Kabupaten Subang

No	Varietas	Tinggi Tanaman (cm)			Jumlah Anakan		
		Fase vegetatif	Fase berbunga	Fase masak	Fase vegetatif	Fase berbunga	Fase masak
1	Inpari 32	90,4	117,4	118,6	41,2	32,8	32,8
2	Inpari 47	97,4	101,4	103,6	31,4	21,0	21,0
3	Inpari 48	75,4	109,8	111,0	26,0	24,6	24,6
4	Inpari 49	86,4	111,2	112,8	31,2	25,2	25,2
5	Cakrabuana	58,0	93,2	95,0	19,0	26,2	26,2

Rata-rata jumlah anakan produktif keempat varietas padi pada kategori sangat banyak yaitu antara 15,6-32,8. Menurut Silitonga *et al.*, (2003), kriteria jumlah anakan padi dapat digolongkan dalam 5 tipe, yaitu sangat banyak (>25 anakan/tanaman), banyak (20-25 anakan/tanaman), sedang (10-19 anakan/tanaman), sedikit (5-9 anakan/tanaman) dan sangat sedikit (<5 anakan/tanaman). Kondisi pertanaman padi pada MT2/2025 di IP2SIP Pusakanagara tidak mendapatkan pengairan yang optimal. Hal ini dikarenakan curah hujan selama periode pertanaman produksi cukup rendah, sehingga pengairan lahan mengandalkan sumber air dari pembagian jadwal irigasi.

Seleksi Tanaman (Roguing)

Untuk menjamin kemurnian genetik tanaman di lapangan, dilakukan seleksi (*roguing*) tanaman mulai sejak fase vegetatif hingga fase masak (Gambar 33). *Roguing* dilakukan secara bertahap berdasarkan umur masak dari masing-masing varietas. Untuk kelas benih FS *roguing* dilakukan secara cermat karena toleransi campuran varietas lain (CVL) di lahan pertanaman kelas benih FS maksimal 0,0%.



Gambar 33. Roguing tanaman padi

Setelah selesai dilakukan seleksi tanaman dan sudah dipastikan bahwa pertanaman padi sudah bersih dari CVL, maka dilakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan oleh petugas dari BPSB.

3. Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam rangka pengawasan produksi benih, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh BPSB baik Provinsi untuk produksi benih kelas FS dan BPSB satpel wilayah Subang untuk produksi benih kelas SS. Pengawasan dan sertifikasi benih di lapangan dilakukan mulai dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh petugas BPSB. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahapan awal pada prosedur sertifikasi benih baku (Gambar 34).

Pemeriksaan lapangan pendahuluan dilaksanakan untuk lahan produksi kelas benih FS dan SS pada bulan Juni 2025 sebelum dilakukan penanaman. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen sebelum semai/tanam. Dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran benih sumber yang digunakan, label benih, kesesuaian jumlah benih dengan luas areal yang diajukan, batas-batas areal yang digunakan, rencana penanaman dan kondisi lahan.



Gambar 34. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan Pertanaman

Pemeriksaan pertanaman bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang akan dihasilkan dari pertanaman tersebut benar varietas yang dimaksud dan tidak tercampur dengan varietas lain. Pada pemeriksaan lapangan fase vegetatif oleh BPSB (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih) dalam produksi benih padi, terdapat beberapa aspek yang diperiksa untuk memastikan kualitas benih yang diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan. Aspek-aspek ini mencakup berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi.

Pemeriksaan pertanaman di lapangan kegiatan produksi benih padi sudah dilakukan oleh petugas BPSB provinsi Jawa Barat untuk kelas benih dasar (FS/BD), sedangkan untuk kelas benih pokok (SS/BP) pemeriksaan dilakukan oleh petugas BPSB Satpel wilayah Subang. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap atau fase, yaitu fase vegetatif, fase berbunga, dan fase masak (menjelang panen) (Gambar 35). Lahan produksi benih padi juga harus dalam kondisi bersih dari gulma atau rumput. Biji gulma dapat berpengaruh dalam kebersihan gabah calon benih bila terbawa saat panen.

Hasil pemeriksaan lapangan tahap pendahuluan hingga fase masak telah dinyatakan lulus lapangan oleh petugas BPSB untuk semua varietas dan kelas benih.



Gambar 35. Pemeriksaan pertanaman fase vegetatif, berbunga dan masak

4. Panen dan Pasca Panen

Panen mulai dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober 2025. Varietas yang dipanen awal yaitu Situbondo BK-01 (FS), Cakrabuana (FS), Inpari 48 (FS) dan Inpari 47 (SS). Umur tanaman varietas genjah Situbondo dan Cakrabuana berkisar antara 81-84 HST. Sedangkan umur panen Inpari 48 sekitar 94 HST, dan Inpari 47 berumur 104 HST. Panen dilakukan dengan menggunakan mesin *combain harvester*. Untuk mencegah terjadinya pencampuran antar varietas saat penggunaan *combain*, maka sebanyak 1 jalur pertanaman (lebih kurang 1-1,5 karung gabah) pada awal panen/peralihan varietas berbeda tidak dijadikan sebagai calon benih.

Total hasil produksi gabah kering panen (GKP) sebesar 174.114 kg dari luasan 48 ha sebagai calon benih kering panen (CBKP). Terdiri dari 50.213 kg kelas FS dan 123.901 kg kelas SS. Untuk mengetahui kadar air gabah panen dilakukan pengukuran menggunakan alat *moister tester*. Pengukuran sampel gabah dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali untuk diketahui angka rata-rata kadar air panen dari setiap lot gabah yang sudah dipanen. Hasil pengukuran kadar air menunjukkan rata-rata kadar air gabah kering panen sebesar 19,7% baik pada kelas FS maupun kelas SS. Kondisi kadar air gabah calon benih dinilai sangat bagus karena gabah cukup kering.

Selanjutnya akan dilakukan proses penjemuran gabah calon benih. Penjemuran gabah bertujuan untuk menurunkan kadar air gabah calon benih hingga mencapai kadar air maksimal persyaratan benih yaitu 13% (Gambar 36). Namun, untuk menjaga agar kualitas benih saat disimpan tetap baik, maka kadar air calon benih harus dibuat lebih rendah berkisar antara 10-11%. Penjemuran gabah dilakukan secara manual dibawah terik matahari, secara bertahap selama 3 hari agar penurunan kadar air benih relatif stabil selama calon benih berada dalam penyimpanan sementara sebelum diuji laboratorium. Penyimpanan sementara benih di gudang dilakukan sambil menunggu masa dormansi benih sekitar 30 hari sejak benih dipanen. Selama proses penjemuran akan terjadi penyusutan bobot gabah calon benih. Oleh karena itu, gabah setelah dijemur atau gabah kering kotor (GKK) perlu ditimbang untuk diketahui bobot keringnya sebelum menuju tahap prosesing benih selanjutnya.



Gambar 36. Panen dan penjemuran calon benih padi

5. Pengolahan Benih

Tahap pengolahan benih berikutnya adalah pengipasan (*blowring*) dan pembersihan benih (*seed cleaning*) (Gambar 37). Pengipasan benih bertujuan untuk memisahkan gabah dari kotoran (sisa tangkai, daun, serasah, gabah hampa), sedangkan pembersihan benih bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik benih sebelum proses pengemasan dan distribusi. Pada tahap ini benih bernas dan benih setengah isi serta sisa gabah hampa akan terpisah.



Gambar 37. *Blowring* dan *Seed Cleaning*

Tahap pengolahan benih ini sangat penting dalam menghasilkan benih bermutu tinggi sesuai standar sertifikasi dengan tujuan utama sebagai berikut:

- a) Menghilangkan kotoran seperti tanah, jerami, debu, batu kecil, dan sisa tanaman yang terbawa saat panen. Hal ini memastikan benih bersih dan aman disimpan.
- b) Meningkatkan kemurnian fisik benih.

Tabel 21 Realisasi volume benih padi kelas FS yang disertifikasi

No	Varietas	Kelas	GKP (Kg)	Benih Bersih (Kg)
1	Inpari 36	FS	3.518	2.880
2	Inpari 37	FS	5.015	4.010
3	Inpari 39	FS	3.725	3.050
4	Inpari 48	FS	4.992	3.970
5	Inpari 49	FS	11.168	8.730
6	Situbondo BK-01	FS	9.379	7.620
7	Cakrabuana	FS	11.828	10.050
Total			49.545	40.310

Hasil akhir dari proses pengolahan benih yaitu jumlah benih bersih yang siap untuk diuji laboratorium oleh BPSB untuk sertifikasi benih. Volume akhir benih yang didaftarkan untuk disertifikasi totalnya sebanyak 140.950 kg dengan rincian 40.310 kg kelas FS dan 100.640 kg kelas SS. Data hasil prosesing benih dan volume benih yang didaftarkan dari masing-masing varietas dan kelas benih padi FS dan SS secara rinci disajikan pada Tabel 21 dan Tabel 22.

Tabel 22 Realisasi volume benih padi kelas SS yang disertifikasi

No	Varietas	Kelas	GKP (Kg)	Benih Bersih (Kg)
1	Inpari 32	SS	16.714	13.700
2	Inpari 47	SS	19.035	15.250
3	Inpari 48	SS	18.435	14.880
4	Inpari 49	SS	52.087	42.700
5	Cakrabuana	SS	17.630	14.110
Total			123.901	100.640

6. Pengambilan sampel uji laboratorium, pengemasan dan pelabelan

Selanjutnya dilakukan tahap akhir pengujian calon benih sebagai persyaratan sertifikasi benih. Pengambilan sampel uji laboratorium dilakukan langsung oleh petugas BPSB. Untuk pengujian benih kelas FS dilakukan oleh petugas BPSB provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk kelas SS dilakukan oleh petugas BPSB Satpel wilayah Subang.

Sampel benih yang akan diuji diambil secara acak pada setiap varietas dan lot benih (Gambar 38). Masing-masing sampel sejumlah 1 kg. Selanjutnya, sampel benih dibawa ke laboratorium untuk diuji mutunya.



Gambar 38. Pengambilan sampel uji benih oleh BPSB

Hasil uji laboratorium BPSB menyatakan bahwa semua benih yang diujikan lulus sertifikasi sesuai dengan persyaratan mutu benih (Tabel 22 dan Tabel 23). Sertifikat benih berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal selesai sertifikasi. Masa berlaku benih kelas SS (26-11-2025 s.d 26-05-2026) dan kelas FS (21-11-2025 s.d 21-05-2026) yang tercantum pada masing-masing label dan sertifikat varietas. Selanjutnya, dilakukan pencetakan label benih untuk kelas FS (warna putih) dan kelas SS (warna ungu)

Tabel 23. Mutu benih kelas FS hasil uji laboratorium

No	Varietas	KA	Benih Murni	Daya Tumbuh	Masa berlaku label
			----- % -----		
1	Inpari 36	12,6	99,8	93	21 Mei 2026
2	Inpari 37	12,6	99,7	93	21 Mei 2026
3	Inpari 39	12,3	99,7	95	21 Mei 2026
4	Inpari 48	12,0	99,7	91	21 Mei 2026
5	Inpari 49	12,0	99,7	90	21 Mei 2026
6	Situbondo BK-01	11,9	99,6	92	21 Mei 2026
7	Cakrabuana	12,1	99,6	91	21 Mei 2026

Tabel 24. Mutu benih kelas SS hasil uji laboratorium

No	Varietas	KA	Benih Murni	Daya Tumbuh	Masa berlaku label
			----- % -----		
1	Inpari 32	12,7	99,7	92	26 Mei 2026
2	Inpari 47	13,0	99,3	93	26 Mei 2026
3	Inpari 48	12,2	99,8	88	26 Mei 2026
4	Inpari 49	12,9	99,5	95	26 Mei 2026
5	Cakrabuana	12,8	99,6	92	26 Mei 2026

Benih dikemas dalam plastik kemasan berjenis PP dengan ketebalan minimal 0,8 mm. Volume benih per kemasan yaitu 5 kg, selanjutnya kemasan di *sealer* rapat agar benih aman selama penyimpanan. Label benih berupa stiker ditempel pada bagian luar kemasan sesuai dengan nama varietas, lot benih dan kelas benih. Kemasan benih selanjutnya dimasukkan dalam karung plastik dengan volume benih 40 kg per karung (Gambar 39).

Karung diberi nama etiket: varietas, kelas, lot benih, volume agar tidak tertukar dengan varietas lainnya. Selanjutnya, karung disusun di gudang penyimpanan benih secara rapi sesuai dengan varietas, lot, dan kelas benih.



Gambar 39. Pengemasan benih dan pelabelan

7. Penyimpanan Benih

Karung benih ditata dan disimpan di gudang penyimpanan sesuai dengan kelompok varietas dan lot benih kemudian diberi identitas (Gambar 40).



Gambar 40. Penyimpanan benih di gudang simpan

8. Pemanfaatan hasil produksi benih

Benih sumber VUB padi yang dihasilkan oleh UPBS BRMP Jawa Barat tahun 2025 diarahkan untuk disebarluaskan melalui skema komersil dalam rangka pemenuhan PNPB balai. Promosi terkait penjualan benih komersil sudah dilakukan dengan berbagai metode dan media promosi, yaitu melalui media sosial BRMP Jawa Barat (ig, Facebook, website resmi), komunikasi dengan Dinas TPH Provisin Jawa Barat, melalui WAG produsen benih padi Jawa Barat, melalui para koordinator wilayah kabupaten/kota se-Jawa Barat, dan penyuluh kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan penyaluran benih padi yang telah diproduksi.

Hingga laporan akhir tahun ini disusun total benih sumber VUB padi yang sudah dijual sebanyak 2.115 kg yang terdiri dari 155 kg benih kelas FS dan 1.960 kg benih kelas SS (Tabel 25). Semua benih didistribusikan secara komersil dengan harga sesuai dengan PP tarif yang berlaku yaitu Rp. 12.000,- per kg benih kelas SS dan Rp. 14.000,- per kg benih kelas FS. Hasil penjualan benih disetorkan sebagai PNPB BRMP Jawa Barat.

Tabel 25 Distribusi benih sumber padi kelas FS dan SS tahun 2025

No	Varietas	Kelas	Jumlah (Kg)	Wilayah Distribusi
1	Inpari 39	FS	55	Majalengka, Riau
2	Inpari 48	FS	50	Subang
3	Cakrabuana	FS	50	Subang
Jumlah FS			155	
1	Inpari 32	SS	140	Kota Banjar, Garut, Indramayu, Bandung
2	Inpari 47	SS	570	Kota Cimahi
3	Inpari 48	SS	90	Subang
4	Inpari 49	SS	760	Ciamis, Bandung, Subang, Bogor, Kota Cimahi
5	Cakrabuana	SS	400	Kota Cimahi
Jumlah SS			1.960	
Total FS + SS			2.115	

Pendapatan dari penjualan benih secara komersil dengan total nilai Rp. 25.690.000,- telah disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BRMP Jawa Barat tahun 2025 (Tabel 26).

Tabel 26 Penerimaan PNPB hasil penjualan benih padi tahun 2025

No	Kelas benih	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
1	FS/BD	155	14.000	2.170.000
2	SS/BP	1.960	12.000	23.520.000
Jumlah				25.690.000

4. Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendukung pencapaian swasembada

pangan nasional sebagaimana tercantum dalam program prioritas nasional periode 2024–2029. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pergeseran pola konsumsi masyarakat ke beras, tantangan perubahan iklim, serta keterbatasan dan degradasi sumber daya lahan pertanian.

Pendampingan dilaksanakan di 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan sasaran utama Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyuluh pertanian, TNI, POLRI, petani, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Program strategis yang didampingi meliputi optimalisasi lahan/cetak sawah rakyat, pembentukan Brigade Pangan, percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) padi reguler, serta pengembangan LTT padi gogo sebagai upaya peningkatan luas tanam dan produksi padi.

Tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan pendampingan teknis dan manajerial terhadap pelaksanaan program strategis pertanian, dengan target optimalisasi lahan/cetak sawah rakyat seluas 7.374 ha, pembentukan 37 Brigade Pangan, pencapaian LTT padi reguler seluas 1.446.446 ha di 21 kabupaten/kota, serta LTT padi gogo seluas 4.188 ha di 10 kabupaten/kota. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi padi, memperkuat kelembagaan petani, serta mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan.

Metodologi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan koordinasi berjenjang dan berkelanjutan, sosialisasi, pengawalan, pendampingan langsung di lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Koordinasi dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan berbagai pemangku kepentingan, sementara pendampingan lapangan difokuskan pada percepatan tanam, penerapan teknologi budidaya, penguatan peran penyuluh, serta penanganan kendala teknis di tingkat petani. Data realisasi LTT dikumpulkan secara harian melalui pelaporan berjenjang mulai dari PPL hingga Dinas Pertanian Provinsi dan dilaporkan melalui sistem pelaporan Kementerian Pertanian.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Optimalisasi lahan non rawa terealisasi sebesar 8.374 ha atau 113,36% dari target, yang berasal dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Pembentukan Brigade Pangan terealisasi sebanyak 49 Brigade Pangan atau 111,36% dari target, menunjukkan keberhasilan penguatan kelembagaan petani dan regenerasi pelaku usaha tani. Realisasi LTT padi reguler mencapai 1.150.086 ha atau 79,51% dari target, sedangkan LTT padi gogo mencapai 3.364,84 ha atau 80,34% dari target. Capaian LTT padi gogo menunjukkan bahwa realisasi sangat bergantung pada semester II, dengan lonjakan signifikan pada bulan September hingga November.



Gambar 41. Pendampingan teknis lapangan Percepatan Luas Tambah Tanam di Subang



Gambar 42. Kegiatan Koordinasi Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang



Gambar 43. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang Bersama Tenaga Ahli Menteri



Gambar 44. Kegiatan Koordinasi dan Pertemuan Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang



Gambar 45. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Pendampingan Luas Tambah Tanam Padi Reguler di Kabupaten Karawang

Secara keseluruhan, kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025 memberikan manfaat nyata bagi pengambil kebijakan dan petani melalui peningkatan luas tanam, penguatan kelembagaan pertanian, peningkatan produksi padi, serta tersedianya data LTT yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kegiatan ini berkontribusi langsung dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional serta menjadi pondasi penting dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat telah menerapkan ISO 17025:2017 untuk Laboratorium Pengujian. Pada Tahun 2025 BRMP Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan assemen ulang dan witness (Re-Akreditasi Laboratorium) lingkup kegiatan pengujian mutu benih dan beras. Laboratorium pengujian BRMP Jawa Barat melaksanakan kegiatan asesmen ulang dan *witness* yang telah dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2024 dengan tim Asesmen yaitu Dr. Saptowo J. Pardal, MS. (Ketua, Teknis), dan Novia Bayu Alnavis (Anggota, Manajemen). Terdapat 15 temuan ketidaksesuaian dengan 11 temuan Kategori 2 dan 4 temuan Observasi. Kegiatan surveilen dan *witness* dipantau dan dinilai secara langsung oleh Assesor dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). Laboratorium mampu menyelesaikan untuk memperbaiki ketidaksesuaian pada saat asesmen lapangan dengan melampirkan bukti TP dan VTP sekitar 2 bulan (3 Februari 2025) sesuai dengan prosedur akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Selanjutnya penerbitan sertifikat dan lampiran laboratorium dengan masa berlaku 19 Maret 2025 hingga 15 Maret 2030.



64

penerapan teknologi spesifik lokasi. Melalui mandat tersebut BRMP Jawa Barat merasa perlu untuk memfasilitasi dan mempersiapkan semua informasi tersebut sebagai materi elektronik yang akan dituangkan ke dalam media *website*, media sosial, database, dan *digital library* sebagai wujud dari pro aktif BRMP Jawa Barat dalam: (1) Implementasi kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*; (2) Percepatan diseminasi hasil pengujian dan penerapan teknologi spesifik lokasi; dan (3) Meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2025 BRMP Jawa Barat kembali mencetak prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Informatif dalam Ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Capaian ini menunjukkan komitmen BRMP Jawa Barat dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan informasi publik, serta memperluas akses masyarakat, khususnya petani, terhadap informasi dan teknologi pertanian modern. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara yang diselenggarakan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa BRMP Jawa Barat kini lebih terbuka, akuntabel dan memudahkan masyarakat khususnya petani dalam mengakses data teknologi pertanian modern secara cepat. Acara ini digelar di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pelayanan informasi publik di sektor pertanian.



Gambar 47. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

3.1.6. Keberhasilan, Kendala dan Langkah antisipasi

A. Keberhasilan

Secara keseluruhan target kinerja BRMP Jawa Barat tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan berhasil bahkan ada yang melebihi target dengan kategori **sangat berhasil** yaitu indikator kinerja jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (110%), jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (102,88%), nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (100,48%) dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (103,62%)

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2025 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi baik secara internal atau eksternal. Faktor internal yang berpengaruh pada keberhasilan pencapaian target kinerja BRMP Jawa Barat antara lain: (1) kesiapan dan perencanaan yang tepat waktu; (2) intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan di masing-masing program dan kegiatan dengan balai untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan; (3) input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan; (4) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (pengawas mutu hasil pertanian, penyuluh, pengawas benih tanaman, pranata komputer, arsiparis, analis sumber daya manusia, pranata APBN, pranata humas dan tenaga administrasi); dan (5) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Secara eksternal, keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, adanya peningkatan respon atas segala umpan balik yang diperoleh, peningkatan kualitas berbagai pelayanan terhadap publik baik layanan kerjasama maupun layanan pengkajian lainnya, serta peningkatan pengelolaan database dan website, sehingga terjalin berbagai kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, baik dengan institusi pemerintah, masyarakat petani maupun akademisi.

B. Kendala

BRMP Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2025 mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah:

1. Transformasi kelembagaan Badan Standarisasi yang mengubah tugas pokok dan fungsi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sehingga perlu penyesuaian dalam melaksanakan kegiatan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pegawai, baik pada unit administrasi maupun kelompok jabatan fungsional, harus terlibat dalam pelaksanaan beberapa kegiatan secara bersamaan. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban kerja, keterbatasan waktu dan fokus, serta berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini juga meningkatkan risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan mempengaruhi optimalisasi kualitas output yang dihasilkan.
3. Adanya pemblokiran anggaran berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal awal.

C. Langkah Antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

1. Untuk mengantisipasi keterbatasan sumber daya manusia, dilakukan pengaturan pembagian tugas dan penjadwalan kegiatan secara lebih proporsional, penetapan skala prioritas kegiatan, serta penguatan koordinasi antar bagian agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat waktu.
2. Penyesuaian kembali rencana pelaksanaan kegiatan sehingga target output kegiatan tetap dapat tercapai dan optimalisasi anggaran dengan cara penyesuaian anggaran sehingga target kegiatan dapat tercapai.

3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian capaian kinerja. Dalam melaksanakan kegiatannya BRMP Jawa Barat telah menerapkan prinsip-prinsip efisien dan efektif, hal ini terbukti dengan telah tercapainya seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan penggunaan dana secara efisien. Nilai efisien diperoleh berdasarkan perhitungan efisiensi pada aplikasi e Monev SMART Kemenkeu, tingkat efisiensi dan nilai efisiensi dapat diukur dari perhitungan indeks SBK, realisasi anggaran, Target Volume Rincian Output (TVRO), Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), indeks realisasi anggaran, dan selisih antara indeks SBK dan indeks realisasi anggaran terhadap indikator rincian output yang masuk dalam SBK, yaitu: (1) Layanan BMN, (2) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dan (3) Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Indeks SBK merupakan besaran standar biaya yang mencerminkan kebutuhan anggaran ideal dalam menghasilkan satuan output kegiatan, yang digunakan sebagai tolak ukur efisiensi antara perencanaan dan realisasi anggaran sedangkan indeks realisasi anggaran adalah nilai yang menggambarkan tingkat penggunaan anggaran berdasarkan realisasi belanja untuk menghasilkan 1 (satu) output kegiatan. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BRMP Jawa Barat menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Hal ini tercermin dari perbandingan antara indeks SBK dengan realisasi anggaran yang secara keseluruhan berada jauh di bawah standar biaya yang telah ditetapkan.

Monitoring Efisiensi SBK Monitoring / Efisiensi SBK

0001 KEMENTERIAN PERTANIAN
0001 Badan Penelitian dan Modernisasi Pertanian
00010001 Balai Penelitian Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Download Excel

Tampilkan 10 entri Cari:

No.	Unit	Setor	Program	RO	Jenis SBK	Unsur SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	Badan Penelitian dan Modernisasi Pertanian	00010001 Balai Penelitian Modernisasi Pertanian Jawa Barat	000100010001 Program Dukungan Manajemen	0001000100010001 Layanan BMN (Layanan)	00010001000100010001 Layanan BMN untuk Setor Eselon I/Setingkat		480.000.000	9.923.500	1,00	1,00	9.923.500	470.076.500	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK.
2	Badan Penelitian dan Modernisasi Pertanian	00010001 Balai Penelitian Modernisasi Pertanian Jawa Barat	000100010001 Program Dukungan Manajemen	0001000100010001 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	00010001000100010001 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)		450.000.000	16.308.100	1,00	1,00	16.308.100	441.691.900	96	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK.
3	Badan Penelitian dan Modernisasi Pertanian	00010001 Balai Penelitian Modernisasi Pertanian Jawa Barat	000100010001 Program Dukungan Manajemen	0001000100010001 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	00010001000100010001 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)		240.000.000	27.004.351	1,00	1,00	27.004.351	212.995.649	89	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK.

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 48. Perhitungan efisiensi pada aplikasi e Monev SMART Kemenkeu Tahun 2025

Pada SBK Layanan BMN, indeks realisasi anggaran sebesar Rp. 9.923.500,- dari indeks SBK Rp. 480.000.000,- menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 98%, yang menunjukkan pelaksanaan layanan dilakukan secara efisien tanpa mengurangi capaian

output, SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi indeks realisasi anggaran sebesar Rp. 16.308.100,- dari indeks SBK Rp. 458.000.000,- dengan tingkat efisiensi 96%, mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan optimal, dan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi mencatat indeks realisasi anggaran sebesar Rp. 27.004.351,- dari indeks SBK Rp240.000.000 dengan tingkat efisiensi 89%. Berdasarkan capaian tersebut, seluruh SBK memperoleh nilai efisiensi maksimal sebesar 20%, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian kinerja balai secara optimal.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2025 BRMP Jawa Barat memperoleh sumber daya anggaran berasal dari DIPA BRMP Jawa Barat. Pagu awal APBN BRMP Jawa Barat TA. 2025 adalah sebesar Rp. 19.910.390.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri dari kegiatan teknis dan dukungan manajemen, daftar kegiatan dan pagu anggaran masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Awal)

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Sosialisasi dan Diseminasi	38.802.000
2.	Pengelolaan Asset Tak Berwujud (ATB)/Paten/PVT Bernilai PNBP Royalti Atas Layanan Kerjasama Lisensi Melalui Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian	704.878.000
3.	Pengelolaan PNBP Sekretariat Badan	127.759.000
4.	Sarana Laboratorium Terstandar	90.538.000
5.	ICare	9.900.000.000
6.	Dukungan Manajemen	9.048.413.000
	<i>Pengelolaan BMN</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>Penyusunan Program dan Anggaran</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Pengelolaan Informasi Publik</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Layanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Layanan Kepegawaian</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Layanan Keuangan</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Layanan Ke TU an, RT, Kearsipan dan Perlengkapan</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Sinkronisasi Kegiatan</i>	<i>30.000.000</i>
	<i>001</i>	<i>5.570.761.000</i>
	<i>002</i>	<i>3.277.652.000</i>
Jumlah		19.910.390.000

Selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, BRMP Jawa Barat melakukan beberapa kali revisi dan penyesuaian terhadap struktur kegiatan dan anggaran. Revisi anggaran dilaksanakan untuk menyesuaikan struktur anggaran berdasarkan arahan

Sekretariat BRMP, terutama dalam rangka mengakomodasi kebijakan yang berkembang terkait program prioritas Kementerian Pertanian serta penyesuaian terhadap kebutuhan operasional Satuan Kerja. Selain itu, penyesuaian struktur anggaran juga merupakan bagian dari upaya penyelarasan pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan dan fokus utama program Kementerian Pertanian. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan sebanyak 20 kali revisi anggaran sebagaimana disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Revisi Anggaran BRMP Jawa Barat TA. 2025

No.	Revisi	PAGU Anggaran	Keterangan
1.	DIPA awal	19.910.310.000	DIPA awal sebelum revisi
2.	Revisi 1	19.910.310.000	Revisi halaman 3 DIPA (Rutin Kemenkeu)
3.	Revisi 2	19.910.310.000	Revisi arahan (Blokir efisiensi)
4.	Revisi 3	19.910.310.000	Revisi POK
5.	Revisi 4	21.060.390.000	Revisi arahan (Tambahan anggaran)
6.	Revisi 5	21.060.390.000	Revisi POK
7.	Revisi 6	21.060.390.000	Revisi halaman 3 DIPA (Rutin Kemenkeu)
8.	Revisi 7	23.406.825.000	Revisi arahan (Tambahan anggaran)
9.	Revisi 8	23.406.825.000	Revisi arahan (Penyesuaian detail anggaran)
10.	Revisi 9	23.406.825.000	Revisi POK (Alokasi Gaji PPPK)
11.	Revisi 10	17.570.825.000	Revisi arahan (Pengurangan anggaran ICare)
12.	Revisi 11	17.570.825.000	Revisi halaman 3 DIPA (Rutin Kemenkeu)
13.	Revisi 12	17.869.270.000	Revisi arahan (Penyesuaian RO, Belpeg, ICare)
14.	Revisi 13	17.014.456.000	Revisi arahan (PNBP non Jabar, ICare)
15.	Revisi 14	17.014.456.000	Revisi POK
16.	Revisi 15	17.236.550.000	Revisi arahan (Pemeliharaan, Pendampingan)
17.	Revisi 16	17.236.550.000	Revisi halaman 3 DIPA (Rutin Kemenkeu)
18.	Revisi 17	22.499.434.000	Revisi arahan (MG Icare)
19.	Revisi 18	22.347.434.000	Revisi arahan (Belpeg)
20.	Revisi 19	22.347.434.000	Revisi POK

Total PAGU Anggaran TA. 2025 pada DIPA yang berlaku pada bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 22.347.434.000 (Dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), besaran anggaran tersebut terbagi kepada kegiatan teknis sebesar Rp. 11.780.482.000 (Sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan kegiatan Dukungan Manajemen sebesar Rp. 10.566.952.000 (Sepuluh milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Dari besaran PAGU anggaran tersebut terdapat beberapa akun yang terblokir sampai dengan akhir tahun kegiatan. Anggaran terblokir sebesar Rp. 543.430.000 (Lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terbagi di 2 kegiatan yaitu pada kegiatan Pendampingan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian sebesar Rp. 509.000.000 (Lima ratus sembilan juta rupiah) dan kegiatan Layanan Umum sebesar Rp. 34.430.000 (Tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Pemblokiran anggaran yang dilakukan merupakan bagian dari efisiensi anggaran merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025, pelaksanaan realisasi anggaran telah dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan laporan realisasi keuangan, sampai dengan 31 Desember 2025, dari total pagu anggaran sebesar: Rp. 22.347.434.000,- telah

terrealisasi sebesar 21.525.860.790,- (96,32%). Tingginya serapan anggaran merupakan salah satu indikator adanya perencanaan yang baik, di dukung oleh adanya monitoring pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang baik sehingga realisasi fisik maupun keuangan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Realisasi DIPA BRMP Jawa Barat Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	5.807.206.000	5.805.172.256	99,96
2	Belanja Barang Operasional	3.369.746.000	3.365.922.615	99,89
3	Belanja Barang Non Operasional	12.174.047.000	11.359.165.919	93,31
4	Belanja Modal	996.435.000	995.600.000	99,92
	JUMLAH	22.437.434.00	21.525.860.790	96,32

3.2.2. Pengelolaan PNB

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terus dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. PNBP memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk membiayai belanja Negara, meskipun jumlahnya tidak sebesar penerimaan dari sektor pajak. Pendapatan negara pada dasarnya bersumber dari 2 aspek pokok yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta didukung oleh Penerimaan Hibah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengatur tentang tata kelola, akuntabilitas, dan mekanisme pengelolaan PNBP yang dikelola melalui APBN agar tertib dan akuntabel.

Penerimaan PNBP BRMP Jawa Barat Tahun 2024 berasal dari 1) **Fungsional** (penjualan hasil pertanian, pendapatan sewa guest house pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya) dan 2) **Umum** (sewa rumah dinas, sewa pemanfaatan ruang, penerimaan kembali belanja pegawai dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian). Sampai dengan akhir Desember 2025 total penerimaan PNBP adalah Rp. 163.051.784,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Perkiraan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BRMP Jawa Barat Tahun 2025

No	Uraian	Perkiraan Target Penerimaan	Realisasi
1	Penerimaan Umum	-	75.121.784
2	Penerimaan Fungsional	146.800.000	87.930.000
	Jumlah	146.800.000	163.051.784

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Instrumen Pertanian (BRMP) Jawa Barat telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan BRMP Jawa Barat sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran capaian kinerja menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 101,74% dengan kategori **sangat berhasil**.
2. Seluruh indikator kinerja telah memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dengan persentase perolehan nilai capaian kinerja > 100% (Sangat Berhasil) yaitu:
 - a. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan nilai capaian 800% yang kemudian dinormalisasi menjadi 100%;
 - b. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan dengan nilai capaian 102,88%;
 - c. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat dengan nilai capaian 100,48%
 - d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat dengan capaian nilai 103,62%.
3. Pelaksanaan kegiatan di lingkup BRMP Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 dibiayai melalui DIPA BRMP Jawa Barat. Pagu awal APBN BRMP Jawa Barat TA. 2025 adalah sebesar Rp. 19.910.390.000,- dan seiring dengan dinamika perubahan kebijakan nasional, dilakukan penyesuaian anggaran sehingga total pagu anggaran DIPA TA. 2025 yang berlaku pada bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 22.347.434.000,-. Realisasi anggaran BRMP Jawa Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 21.525.860.790,- atau mencapai 96,32% dari total pagu anggaran. Tingginya tingkat realisasi tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang didukung oleh pelaksanaan monitoring dan pengendalian yang optimal. Dengan demikian, realisasi fisik maupun keuangan kegiatan BRMP Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan BRMP Jawa Barat adalah:

1. Merencanakan kegiatan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada
2. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai dengan target dalam perencanaan
3. Perlunya distribusi dan re-distribusi sumber daya manusia (SDM) internal BRMP Jawa Barat agar SDM yang ada dapat diberdayakan secara maksimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang semakin berat, baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) dalam rangka penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian di daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
Jl. KAYUAMBON NOMOR. 110 LEMBANG, BANDUNG BARAT JAWA BARAT KODE POS 40391
TELEPON (022) 2786238. FAKSIMILE (022) 2785846
WEBSITE : jabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsiip.jabar@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rustan Massinal
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Fadry Djufry

Rustan Massinal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai)	80
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 10.861.977.000
1.	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 10.861.977.000
	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. -
2.	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. -
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.048.413.000
3.	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 9.048.413.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat


Rustan Massinai

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
TOTAL			UNIT	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi II)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
JI. KAYUAMBON NOMOR 80 LEMBANG, BANDUNG BARAT JAWA BARAT KOTAK POS 40391
TELEPON (022) 2786238 FAKSIMILI (022) 2789545
WEBSITE jabar.bmrp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rustan Massinai
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Mei 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Fadjry Djufry


Rustan Massinai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2.	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	137
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	80
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 10.861.977.000
	Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp. 10.861.977.000
2	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 2.346.435.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 2.346.435.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.198.413.000
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 10.198.413.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 11.499.894.000 terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 10.861.977.000
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 3.712.000
- Program Dukungan Manajemen Rp. 584.205.000

Jakarta, 20 Mei 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Rustan Massinai

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi Kelas FS	37	Ton
		Produksi Benih Padi Kelas SS	100	Ton
		TOTAL	137	Ton

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi III)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
JL. KAYUAMBON NOMOR. 80 LEMBANG, BANDUNG BARAT JAWA BARAT KOTAK POS 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILI (022) 2789846
WEBSITE : jabar.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rustan Massinai
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Fadry Djufry

Rustan Massinai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	Lembaga
2.	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	137	Unit
3.	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	-	Orang
LAINNYA				
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	83,04	Nilai
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	91	Nilai

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 9.434.047.000
	Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp. 9.434.047.000
2.	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 2.346.435.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 2.346.435.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.566.952.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 10.566.952.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 544.700.000 terdiri dari:

- Program Dukungan Manajemen Rp. 544.700.000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Rustan Massinai

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	-	Teknologi
	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	137	Unit
TOTAL			137	Produk/Unit

Lampiran 4. Manual IKU BRMP Jawa Barat Tahun 2025

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Perhitungan
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
2.	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan dari kegiatan perekayasaan dan perakitan
		Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan pada tahun berjalan
3.	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern pada tahun berjalan
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan pada nilai yang dikeluarkan oleh Tim PMPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB BRMP
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)	Aplikasi SMART

Manual Indikator 1: Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar pada tahun berjalan di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat melalui kegiatan produksi benih sumber spesifik lokasi, ICARE, Lembaga Penerap Standar yang didampingi dan kegiatan pendampingan terkait lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar pada tahun berjalan di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat melalui kegiatan produksi benih sumber spesifik lokasi, ICARE, Lembaga Penerap Standar yang didampingi dan kegiatan pendampingan terkait lainnya Formula $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usahatani yang Menerapkan Standar}}{\text{Total Target Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar selama 5 tahun}} \times 100$ Tujuan
Satuan	%
Target	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact

Manual Indikator 2: Jumlah Teknologi Pertanian yang Adaptif (Teknologi)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat melalui kegiatan perekayasaan dan perakitan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah teknologi modernisasi pertanian adaptif pada tahun berjalan di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Formula $\frac{\text{Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif}}{\text{Total target teknologi modernisasi pertanian yang adaptif selama 5 tahun}} \times 100$ Tujuan
Satuan	%
Target	2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Manual Indikator 3: Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat melalui kegiatan perekayasaan dan perakitan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah. Formula $\frac{(\text{Jumlah produksi benih atau bibit sumber spesifik lokasi})}{\text{Total target benih atau bibit sumber spesifik lokasi}} \times 100$ Tujuan
Satuan	%
Target	2025: 137 2026: 75,177 2027: 2028: 2029:
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Manual Indikator 4: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Formula 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai PMPRB BRMP Tujuan Mewujudkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 83,04 2026: 83,44 2027: 83,45

Program	Dukungan Manajemen
	2028: 83,46 2029: 83,47
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Manual Indikator 5: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja..
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA.. Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..
Satuan	Nilai
Target	2025: 91 2026: 91,52 2027: 92 2028: 93 2029: 94
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak

Program	Dukungan Manajemen
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Lampiran 5. Label Benih Kelas FS dan SS Pada Setiap Varietas

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT		BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT	
UPBS BRMP JABAR Asal: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat No Label : 190594 Jenis : Padi Inbrida Varietas : Inpari 36 Lanrang Berat : 5 Kg Tgl Panen : 15-10-2025 Tgl Selesai Uji : 21-11-2025 Tgl Akhir Label : 21-05-2026 No Lot : F 06/BD/IVBRMPJABAR/25 2025.Pdn JJ.D.11092016001100139.D		UPBS BRMP JABAR Asal: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat No Label : 189489 Jenis : Padi Inbrida Varietas : Inpari 37 Lanrang Berat : 5 Kg Tgl Panen : 11-10-2025 Tgl Selesai Uji : 21-11-2025 Tgl Akhir Label : 21-05-2026 No Lot : F 07/BD/IVBRMPJABAR/25 2025.Pdn KJ.D.11092016001100138.D	
BENIH DASAR Kadar Air : 12.6 % Benih Murni : 99.8 % CVL : 0.0 % Ketr. Benih : 0.2 % Benih TL : 0.0 % Biji Gulma : 0.0 % D. Kecambah : 93 %		BENIH DASAR Kadar Air : 12.6 % Benih Murni : 99.7 % CVL : 0.0 % Ketr. Benih : 0.3 % Benih TL : 0.0 % Biji Gulma : 0.0 % D. Kecambah : 93 %	
UPBS BRMP JABAR Asal: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat No Label : 186518 Jenis : Padi Inbrida Varietas : Cakrabuana Agrita Berat : 5 Kg Tgl Panen : 06-10-2025 Tgl Selesai Uji : 21-11-2025 Tgl Akhir Label : 21-05-2026 No Lot : F 05/BD/IVBRMPJABAR/25 2025.Pdn TK.D.11092016001100130.D		UPBS BRMP JABAR Asal: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat No Label : 187354 Jenis : Padi Inbrida Varietas : BK Situbondo 01 Berat : 5 Kg Tgl Panen : 04-10-2025 Tgl Selesai Uji : 21-11-2025 Tgl Akhir Label : 21-05-2026 No Lot : F 03/BD/IVBRMPJABAR/25 2025.Pdn FN.D.11092016001100132.D	
BENIH DASAR Kadar Air : 12.2 % Benih Murni : 99.7 % CVL : 0.0 % Ketr. Benih : 0.3 % Benih TL : 0.0 % Biji Gulma : 0.0 % D. Kecambah : 91 %		BENIH DASAR Kadar Air : 11.9 % Benih Murni : 99.6 % CVL : 0.0 % Ketr. Benih : 0.4 % Benih TL : 0.0 % Biji Gulma : 0.0 % D. Kecambah : 92 %	
UPBS BRMP JABAR Asal: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat No Label : 184591 Jenis : Padi Inbrida Varietas : Inpari 49 Jembar Berat : 5 Kg Tgl Panen : 17-10-2025 Tgl Selesai Uji : 21-11-2025 Tgl Akhir Label : 21-05-2026 No Lot : F 15/BD/IVBRMPJABAR/25 2025.Pdn RM.D.11092016001100126.D		UPBS BRMP JABAR Asal: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat No Label : 190019 Jenis : Padi Inbrida Varietas : INPARI 36 TADAH Berat : 5 Kg Tgl Panen : 12-10-2025 Tgl Selesai Uji : 21-11-2025 Tgl Akhir Label : 21-05-2026 No Lot : F 08/BD/IVBRMPJABAR/25 2025.Pdn NJ.D.11092016001100137.D	
BENIH DASAR Kadar Air : 12.0 % Benih Murni : 99.7 % CVL : 0.0 % Ketr. Benih : 0.3 % Benih TL : 0.0 % Biji Gulma : 0.0 % D. Kecambah : 90 %		BENIH DASAR Kadar Air : 12.3 % Benih Murni : 99.7 % CVL : 0.0 % Ketr. Benih : 0.3 % Benih TL : 0.0 % Biji Gulma : 0.0 % D. Kecambah : 95 %	
UPBS BRMP JABAR Asal: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat No Label : 191676 Jenis : Padi Inbrida Varietas : Inpari 48 Bias Berat : 5 Kg Tgl Panen : 05-10-2025 Tgl Selesai Uji : 21-11-2025 Tgl Akhir Label : 21-05-2026 No Lot : F 01/BD/IVBRMPJABAR/25 2025.Pdn TL.D.11092016001100136.D			
BENIH DASAR Kadar Air : 12.0 % Benih Murni : 99.7 % CVL : 0.0 % Ketr. Benih : 0.3 % Benih TL : 0.0 % Biji Gulma : 0.0 % D. Kecambah : 91 %			

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT

Produksi Benih
UPBS BRMP JABAR
Alamat: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat

No Label : 3215565
Jenis : Padi Inbrida
Varietas : Inpan 32 HDB
Berat : 5 Kg

Tgl Panen : 11-10-2025
Tgl Selesai Uji : 26-11-2025
Tgl Akhir Label : 26-05-2026
No Lot : F.24/BRMP/BRMP JABAR/25
2025.Pdn QI.P.11092016001130879.D

Kadar Air : 12.7 %
Benih Murni : 99.7 %
CVL : 0.4 %
Kotr. Benih : 0.3 %
Benih TL : 0.0 %
Biji Gulma : 0.0 %
D. Kecambah : 92 %

BENIH POKOK



BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT

Produksi Benih
UPBS BRMP JABAR
Alamat: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat

No Label : 3222215
Jenis : Padi Inbrida
Varietas : Inpan 47 WBC
Berat : 5 Kg

Tgl Panen : 15-10-2025
Tgl Selesai Uji : 26-11-2025
Tgl Akhir Label : 26-05-2026
No Lot : F.13/BRMP/BRMP JABAR/25
2025.Pdn SL.P.11092016001130882.D

Kadar Air : 13.0 %
Benih Murni : 99.3 %
CVL : 0.5 %
Kotr. Benih : 0.7 %
Benih TL : 0.0 %
Biji Gulma : 0.0 %
D. Kecambah : 92 %

BENIH POKOK



BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT

Produksi Benih
UPBS BRMP JABAR
Alamat: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat

No Label : 3223871
Jenis : Padi Inbrida
Varietas : Inpan 48 Blas
Berat : 5 Kg

Tgl Panen : 10-10-2025
Tgl Selesai Uji : 26-11-2025
Tgl Akhir Label : 26-05-2026
No Lot : F.17/BRMP/BRMP JABAR/25
2025.Pdn TL.P.11092016001130881.D

Kadar Air : 12.8 %
Benih Murni : 99.7 %
CVL : 0.4 %
Kotr. Benih : 0.3 %
Benih TL : 0.0 %
Biji Gulma : 0.0 %
D. Kecambah : 86 %

BENIH POKOK



BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT

Produksi Benih
UPBS BRMP JABAR
Alamat: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat

No Label : 3207562
Jenis : Padi Inbrida
Varietas : Inpan 49 Jembar
Berat : 5 Kg

Tgl Panen : 10-10-2025
Tgl Selesai Uji : 26-11-2025
Tgl Akhir Label : 26-05-2026
No Lot : F.20/BRMP/BRMP JABAR/25
2025.Pdn RM.P.11092016001130876.D

Kadar Air : 12.8 %
Benih Murni : 99.6 %
CVL : 0.4 %
Kotr. Benih : 0.4 %
Benih TL : 0.0 %
Biji Gulma : 0.0 %
D. Kecambah : 93 %

BENIH POKOK



BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT

Produksi Benih
UPBS BRMP JABAR
Alamat: Kec. Lembang - Kab. Bandung Barat

No Label : 3202759
Jenis : Padi Inbrida
Varietas : Cakrabuana Agrinid
Berat : 5 Kg

Tgl Panen : 10-10-2025
Tgl Selesai Uji : 26-11-2025
Tgl Akhir Label : 26-05-2026
No Lot : F.18/BRMP/BRMP JABAR/25
2025.Pdn TK.P.11092016001130880.D

Kadar Air : 12.8 %
Benih Murni : 99.6 %
CVL : 0.4 %
Kotr. Benih : 0.4 %
Benih TL : 0.0 %
Biji Gulma : 0.0 %
D. Kecambah : 92 %

BENIH POKOK



[illegible]

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Ciganti II Bojongsong Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Faksimile (022) 7565052, e-mail : tsdpt@provjabar@gmail.com
B A N D U N G 40267

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor: S21.211/177/19/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pemeriksaan dan pengujian mutu benih di laboratorium terdapat:

Jenis Tanaman : Padi Sawah (Dryas wetri)
Varietas : Inpar 47 HSC
Kelas Benih : (B1) Padi
Nomor Induk : 2025-04-01/P.11090/0001200810
Murni Tanaman : 2025
Nomor Uji/Lab/Temp : F.120/000/000P/000A/25
Tanggal Penen : 26-11-2025
Tanggal Sertifikat Pengujian : 26-11-2025
Volume : 15,250 ton

ATAS NAMA
Produsen Benih Bina : UPRIS BINA PANG
Taman Pangan : A. Kaya Andono no 80 Lembang
Alamat :

Daftar Data Mutu Benih

Composita kemurnian	93.9 %	Dapat berkecambah	99.9 %
Kadar air	12.8 %	Kelembaban benih	0.0 %
Benih murni	99.9 %	Kelembaban benih	0.0 %
Kontaminasi	0.1 %	Benih rusak	0.0 %

Tidak memenuhi standar mutu sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat. Dengan demikian dapat diberikan label benih sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat, dengan tanggal akhir berlaku label : 26-11-2025

Bandung, 26-11-2025

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT


Riwanto, SP
Pemerita Tugastu I
NIK: 19700312000010000

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Ciganti II Bojongsong Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Faksimile (022) 7565052, e-mail : tsdpt@provjabar@gmail.com
B A N D U N G 40267

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor: S21.211/177/19/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pemeriksaan dan pengujian mutu benih di laboratorium terdapat:

Jenis Tanaman : Padi Sawah (Dryas wetri)
Varietas : Inpar 47 HSC
Kelas Benih : (B1) Padi
Nomor Induk : 2025-04-01/P.11090/0001200810
Murni Tanaman : 2025
Nomor Uji/Lab/Temp : F.120/000/000P/000A/25
Tanggal Penen : 26-11-2025
Tanggal Sertifikat Pengujian : 26-11-2025
Volume : 15,250 ton

ATAS NAMA
Produsen Benih Bina : UPRIS BINA PANG
Taman Pangan : A. Kaya Andono no 80 Lembang
Alamat :

Daftar Data Mutu Benih

Composita kemurnian	93.9 %	Dapat berkecambah	99.9 %
Kadar air	12.8 %	Kelembaban benih	0.0 %
Benih murni	99.9 %	Kelembaban benih	0.0 %
Kontaminasi	0.1 %	Benih rusak	0.0 %

Tidak memenuhi standar mutu sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat. Dengan demikian dapat diberikan label benih sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat, dengan tanggal akhir berlaku label : 26-11-2025

Bandung, 26-11-2025

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT


Riwanto, SP
Pemerita Tugastu I
NIK: 19700312000010000

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Ciganti II Bojongsong Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Faksimile (022) 7565052, e-mail : tsdpt@provjabar@gmail.com
B A N D U N G 40267

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor: S21.211/177/19/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pemeriksaan dan pengujian mutu benih di laboratorium terdapat:

Jenis Tanaman : Padi Sawah (Dryas wetri)
Varietas : Inpar 47 HSC
Kelas Benih : (B1) Padi
Nomor Induk : 2025-04-01/P.11090/0001200810
Murni Tanaman : 2025
Nomor Uji/Lab/Temp : F.120/000/000P/000A/25
Tanggal Penen : 26-11-2025
Tanggal Sertifikat Pengujian : 26-11-2025
Volume : 15,250 ton

ATAS NAMA
Produsen Benih Bina : UPRIS BINA PANG
Taman Pangan : A. Kaya Andono no 80 Lembang
Alamat :

Daftar Data Mutu Benih

Composita kemurnian	93.9 %	Dapat berkecambah	99.9 %
Kadar air	12.8 %	Kelembaban benih	0.0 %
Benih murni	99.9 %	Kelembaban benih	0.0 %
Kontaminasi	0.1 %	Benih rusak	0.0 %

Tidak memenuhi standar mutu sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat. Dengan demikian dapat diberikan label benih sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat, dengan tanggal akhir berlaku label : 26-11-2025

Bandung, 26-11-2025

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT


Riwanto, SP
Pemerita Tugastu I
NIK: 19700312000010000

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Ciganti II Bojongsong Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Faksimile (022) 7565052, e-mail : tsdpt@provjabar@gmail.com
B A N D U N G 40267

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor: S21.211/177/19/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pemeriksaan dan pengujian mutu benih di laboratorium terdapat:

Jenis Tanaman : Padi Sawah (Dryas wetri)
Varietas : Inpar 47 HSC
Kelas Benih : (B1) Padi
Nomor Induk : 2025-04-01/P.11090/0001200810
Murni Tanaman : 2025
Nomor Uji/Lab/Temp : F.120/000/000P/000A/25
Tanggal Penen : 26-11-2025
Tanggal Sertifikat Pengujian : 26-11-2025
Volume : 15,250 ton

ATAS NAMA
Produsen Benih Bina : UPRIS BINA PANG
Taman Pangan : A. Kaya Andono no 80 Lembang
Alamat :

Daftar Data Mutu Benih

Composita kemurnian	93.9 %	Dapat berkecambah	99.9 %
Kadar air	12.8 %	Kelembaban benih	0.0 %
Benih murni	99.9 %	Kelembaban benih	0.0 %
Kontaminasi	0.1 %	Benih rusak	0.0 %

Tidak memenuhi standar mutu sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat. Dengan demikian dapat diberikan label benih sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat, dengan tanggal akhir berlaku label : 26-11-2025

Bandung, 26-11-2025

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT


Riwanto, SP
Pemerita Tugastu I
NIK: 19700312000010000

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Ciganti II Bojongsong Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Faksimile (022) 7565052, e-mail : tsdpt@provjabar@gmail.com
B A N D U N G 40267

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor: S21.211/177/19/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pemeriksaan dan pengujian mutu benih di laboratorium terdapat:

Jenis Tanaman : Padi Sawah (Dryas wetri)
Varietas : Inpar 47 HSC
Kelas Benih : (B1) Padi
Nomor Induk : 2025-04-01/P.11090/0001200810
Murni Tanaman : 2025
Nomor Uji/Lab/Temp : F.120/000/000P/000A/25
Tanggal Penen : 26-11-2025
Tanggal Sertifikat Pengujian : 26-11-2025
Volume : 15,250 ton

ATAS NAMA
Produsen Benih Bina : UPRIS BINA PANG
Taman Pangan : A. Kaya Andono no 80 Lembang
Alamat :

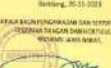
Daftar Data Mutu Benih

Composita kemurnian	93.9 %	Dapat berkecambah	99.9 %
Kadar air	12.8 %	Kelembaban benih	0.0 %
Benih murni	99.9 %	Kelembaban benih	0.0 %
Kontaminasi	0.1 %	Benih rusak	0.0 %

Tidak memenuhi standar mutu sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat. Dengan demikian dapat diberikan label benih sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat, dengan tanggal akhir berlaku label : 26-11-2025

Bandung, 26-11-2025

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT


Riwanto, SP
Pemerita Tugastu I
NIK: 19700312000010000

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Ciganti II Bojongsong Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Faksimile (022) 7565052, e-mail : tsdpt@provjabar@gmail.com
B A N D U N G 40267

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor: S21.211/177/19/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pemeriksaan dan pengujian mutu benih di laboratorium terdapat:

Jenis Tanaman : Padi Sawah (Dryas wetri)
Varietas : Inpar 47 HSC
Kelas Benih : (B1) Padi
Nomor Induk : 2025-04-01/P.11090/0001200810
Murni Tanaman : 2025
Nomor Uji/Lab/Temp : F.120/000/000P/000A/25
Tanggal Penen : 26-11-2025
Tanggal Sertifikat Pengujian : 26-11-2025
Volume : 15,250 ton

ATAS NAMA
Produsen Benih Bina : UPRIS BINA PANG
Taman Pangan : A. Kaya Andono no 80 Lembang
Alamat :

Daftar Data Mutu Benih

Composita kemurnian	93.9 %	Dapat berkecambah	99.9 %
Kadar air	12.8 %	Kelembaban benih	0.0 %
Benih murni	99.9 %	Kelembaban benih	0.0 %
Kontaminasi	0.1 %	Benih rusak	0.0 %

Tidak memenuhi standar mutu sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat. Dengan demikian dapat diberikan label benih sebagai Benih Varietas Unggul Bersertifikat, dengan tanggal akhir berlaku label : 26-11-2025

Bandung, 26-11-2025

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT


Riwanto, SP
Pemerita Tugastu I
NIK: 19700312000010000

Lampiran 7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) BRMP Jawa Barat



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR: 881.1/KPTS/OT.050/H.12.11/06/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
8. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2025 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN Jawa Barat, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2025, tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama	:	Menunjuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.
Kedua	:	Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 02 Juni 2025

KEPALA BALAI



GUSTAN MASSINAI

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian,
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Jawa Barat

Nomor : 881.1/KPTS/OT.050/H.12.11/06/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN 2025

No	Nama	Status dalam Tugas
1.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P. M.Si NIP. 196908022002121001	Penanggung Jawab
2.	Taemi Fahmi, S.Pt NIP. 197412202008121001	Ketua
3.	Bambang Sunandar, S.P, M.P NIP. 197703282005011002	Anggota
4.	Atang Muhammad Safei, S.P. M.Si NIP. 198208122011011010	Anggota
5.	Mira Putri Utami, S.E NIP. 197811192005012001	Anggota



KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI

Lampiran 8. SOP Penyusunan LAKIN BRMP Jawa Barat Tahun 2025

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT (BRMP JAWA BARAT)	Nomor SOP	860.1/SOP/BRMP JAWA BARAT/2025
	Tanggal Pembuatan	28 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Mei 2025
	Disahkan Oleh	 Dr. Rustan Massinai, S.T.P, M.Sc NIP. 196908022002121001
	Nama SOP	LAPORAN KINERJA

Dasar Hukum - UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara - Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 - Perpres No 29 tahun 2014 - PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP	Kualifikasi Pelaksana - Penanggungjawab kegiatan - Minimal berpendidikan S1 - Memahami SAKIP
Keterkaitan - SOP Laporan bulanan - SOP Laporan Tahunan	Peralatan/Perlengkapan Seperangkat komputer dan ATK
Peringatan - Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan : - tidak terinformasinya kinerja BRMP Jawa Barat - tidak tersedianya bahan evaluasi AKIP	Pencatatan dan Pendataan LAKIN

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI	
	Nomor : 860.1/SOP/BRMP JAWA BARAT/2025 Tanggal Pembuatan : 28 Mei 2025 Tanggal Penetapan : 28 Mei 2025 Tanggal Revisi :
SOP LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT (BRMP JAWA BARAT)	
Pengertian	: Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
Tujuan	: terselesaikannya laporan kinerja
Kebijakan/Dasar Hukum	: - UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara - Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 - Perpres No 29 tahun 2014 - PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP
Prosedur	: - Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Provinsi - Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dari BRMP Provinsi - Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja - Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan - Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui untuk pencetakan laporan kinerja - Mendokumentasikan laporan
Keterkaitan	: - SOP Laporan bulanan - SOP Laporan Tahunan

No: 860.1/SOP/BRMP JAWA BARAT/2025

SOP LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Tim Penyusun Laporan BRMP Jawa Barat	Katim PE	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Katim PE	Ka. BRMP Jawa Barat	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Jawa Barat dan menyampaikan ke seksi evaluasi								
2	Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dan BRMP Jawa Barat						Data dan informasi	1 bulan	Berkas
3	Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja						Data dan informasi	7 hari	Draf Laporan
4	Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan						Draf Laporan	2 bulan	Draf laporan
5	Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui pencetakan laporan kinerja						Draft	15 hari	Buku Laporan kinerja
6	Pencetakan Laporan						Buku Laporan kinerja	3 hari	Buku Laporan kinerja
7	Mendokumentasikan laporan						Buku laporan kinerja	1 hari	Buku Lakin